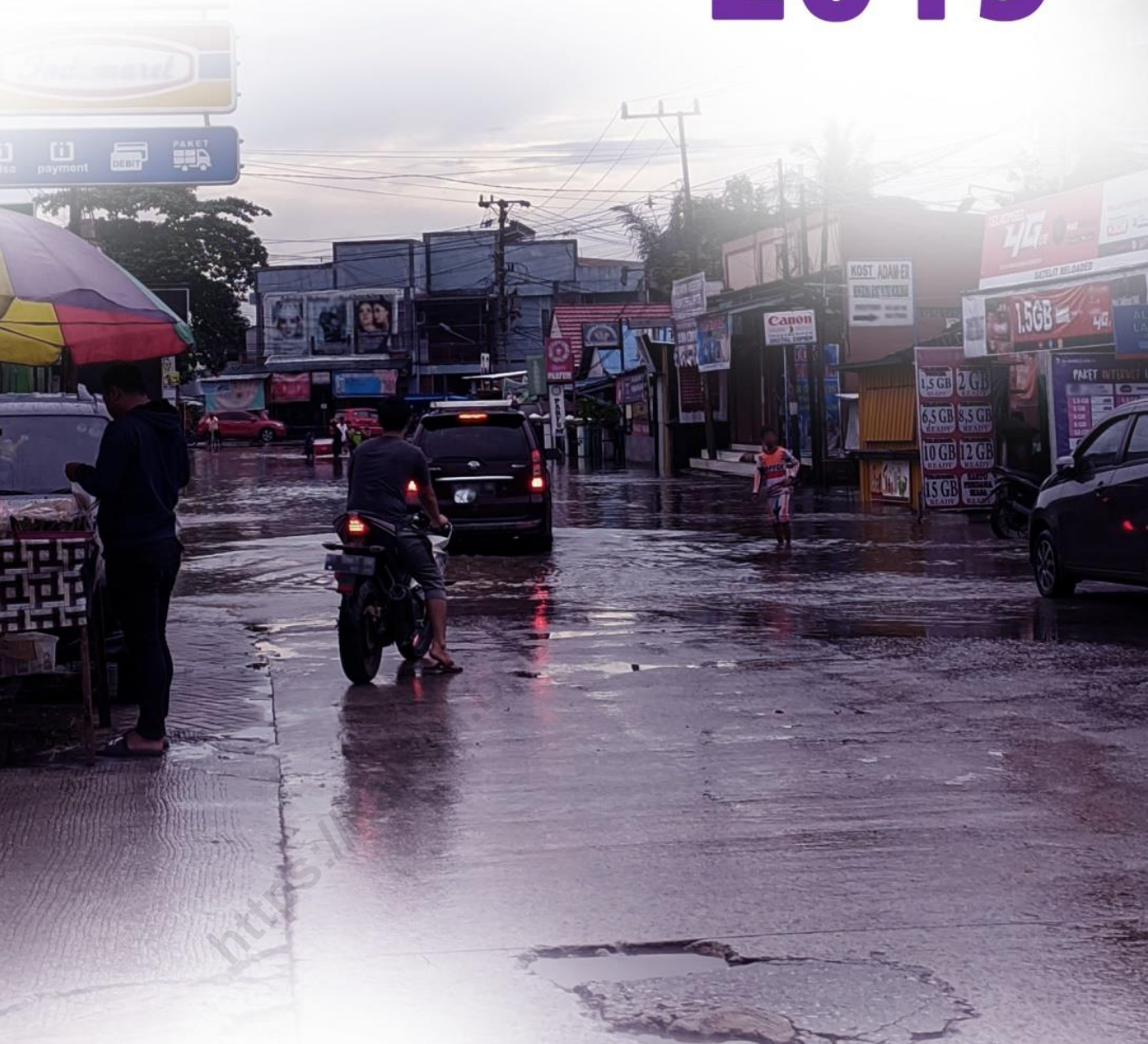


INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

2019



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

2019



INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 2019

ISBN	: 978-623-7693-11-6
No. Publikasi	: 64550.2006
Katalog	: 4102002.64
Ukuran Buku	: 17,6 cm x 25 cm
Jumlah Halaman	: xvi + 86 halaman
Naskah	: Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik
Penyunting	: Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik
Gambar Kover oleh	: Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik

Diterbitkan oleh:

© Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur

Dicetak oleh:

CV Suvi Sejahtera

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik



Tim Penyusun

Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Kalimantan Timur 2019

Pengarah:

Dr. Drs. Anggoro Dwitjahyono, M.Si

Penanggung Jawab:

Dr. Yusniar Juliana, S.Si, MDEC

Editor:

Ika Ayuningtyas, S.ST, M.Si.

Penulis:

Muhammad Suryanata, S.Si.

Deasi Rahmawati

Pengolah Data:

Ika Ayuningtyas, S.ST, M.Si.

Desain/Layout:

Muhammad Suryanata, S.Si.

Deasi Rahmawati, S.Si.

Kata Pengantar

Publikasi **“Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Kalimantan Timur 2019”** menyajikan angka IPM Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten/Kota, serta dilengkapi dengan komponen pembentuk IPM dari tahun 2010-2019 yaitu: angka harapan hidup; harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah; dan pengeluaran per kapita per tahun.

IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. Capaian pembangunan manusia di Kalimantan Timur selama kurun waktu 2010-2019 menunjukkan peningkatan dalam setiap tahun. Status IPM Kalimantan Timur dari tahun 2010–2019 telah berstatus “Tinggi”.

Semoga publikasi ini dapat bermanfaat bagi semua kalangan yang berkepentingan, termasuk masyarakat pengguna data sebagai bahan rujukan. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian publikasi ini, kami sampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya. Saran dan umpan balik yang bersifat membangun, sangat kami harapkan untuk penyempurnaan publikasi berikutnya.

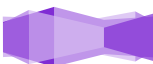
Samarinda, Agustus 2020
Kepala Badan Pusat Statistik
Provinsi Kalimantan Timur



Dr. Drs. Anggoro Dwitjahyono, M.Si.

Daftar Isi

Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii
Daftar Tabel.....	ix
Daftar Gambar.....	xi
Daftar Lampiran.....	xv
1. BAB I Pembangunan Manusia Sebagai Tujuan	1
Konsep Dasar Pembangunan Manusia	3
Pengukuran Pembangunan Manusia.....	4
Pembangunan Manusia dalam SDGs.....	7
Pembangunan Manusia dalam Dokumen Perencanaan Daerah.....	9
2. BAB II Potret Pembangunan Manusia Kalimantan Timur.....	13
Pembangunan Manusia Kalimantan Timur pada Tatatan Nasional	15
Pembangunan Manusia di Provinsi Kalimantan Timur Terus Meningkat	16
Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota.....	19
Perbandingan Antar Wilayah.....	24
3. BAB III Kemajuan Pembangunan Manusia: Capaian dan Tantangan ...	29
Kesempatan Hidup yang Lebih Lama.....	31
Pendidikan untuk Semua	40
Peningkatan Standar Hidup Layak	47
4. BAB IV Disparitas Pembangunan Manusia	53
Disparitas Antarindividu	55
Disparitas Gender	56
Disparitas Antardimensi dan Antarwilayah	58
Lampiran	67
Catatan Teknis	79



Daftar Tabel

Tabel 1.1	Perubahan Pengukuran IPM	6
Tabel 2.1	Klasifikasi Status Pembangunan Manusia	18
Tabel 2.2	Komponen dan Nilai IPM Kalimantan Timur, 2019	18
Tabel 2.3	Perubahan Status Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur	23

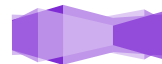
Daftar Gambar

Gambar 1.1	Sejarah Pengukuran IPM	5
Gambar 1.2	<i>Sustainable Development Goals</i>	7
Gambar 2.1	Peta IPM di Indonesia, 2019.....	16
Gambar 2.2	Perkembangan Indeks Pembangunan Kalimantan Timur, 2010-2019.....	17
Gambar 2.3	Peta IPM Kalimantan Timur, 2019	20
Gambar 2.4	Pertumbuhan IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur, 2018-2019 (persen)	21
Gambar 2.5	Kabupaten/Kota dengan Pertumbuhan IPM tertinggi dan Terendah, 2019	22
Gambar 2.6	Indeks Pembangunan Manusia di Pulau Kalimantan, 2019	24
Gambar 2.7	Umur Harapan Hidup di Pulau Kalimantan, 2019 (tahun)	25
Gambar 2.8	Harapan Lama Sekolah di Pulau Kalimantan, 2019 (tahun)	25
Gambar 2.9	Rata-rata Lama Sekolah di Pulau Kalimantan, 2019 (tahun)....	26
Gambar 2.10	Pengeluaran Per Kapita di Pulau Kalimantan, 2019 (ribu rupiah)	27
Gambar 3.1	Umur Harapan Hidup Kalimantan Timur, 2010-2019	32
Gambar 3.2	Umur Harapan Hidup Kalimantan Timur per Kabupaten/Kota, 2019.....	33
Gambar 3.3	Indikator Lingkungan, 2019.....	34
Gambar 3.4	Persentase Desa yang memiliki Puskesmas dan Rasio Puskesmas per Kecamatan di Kalimantan Timur, 2018	36
Gambar 3.5	Persentase Penduduk yang Berobat Jalan menurut Tempat Berobat di Kalimantan Timur, 2019	37
Gambar 3.6	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita, 2016-2018	38

Gambar 3.7	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada Anak di Bawah Dua Tahun/Baduta, 2016-2018	39
Gambar 3.8	Rata-rata Lama Sekolah di Provinsi Kalimantan Timur, 2010-2019	41
Gambar 3.9	Harapan Lama Sekolah di Provinsi Kalimantan Timur, 2010-2019	42
Gambar 3.10	Rata-rata Lama Sekolah per Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur, 2019	43
Gambar 3.11	Harapan Lama Sekolah per Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur, 2019	44
Gambar 3.12	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kalimantan Timur, 2015-2019	45
Gambar 3.13	Jumlah Sekolah dan Perguruan Tinggi di Kalimantan Timur, 2017/2018-2019/2020	46
Gambar 3.14	Persentase Ruang Kelas Baik di Kalimantan Timur, 2016-2019	47
Gambar 3.15	Rata-rata Pengeluaran Per Kapita Per Tahun Masyarakat Kalimantan Timur, 2010-2019 (ribu rupiah).....	48
Gambar 3.16	Rata-rata Pengeluaran Masyarakat Per Kapita Per Tahun per Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur, 2019 (ribu rupiah)	49
Gambar 3.17	Tren Kemiskinan di Kalimantan Timur, 2011-2019	50
Gambar 3.18	Tren Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kalimantan Timur, 2011-2019	51
Gambar 3.19	Pengangguran Terbuka menurut Pendidikan di Kalimantan Timur, Agustus 2019 (Persen)	52
Gambar 4.1	Tingkat Ketimpangan (Gini Ratio) di Kalimantan Timur, 2015-2019	56
Gambar 4.2	Indeks Pembangunan Gender (IPG) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur, 2019	57
Gambar 4.3	Perkembangan Indeks dan Standar Deviasi Indeks Pembangunan Manusia di Kalimantan Timur, 2010-2019.....	59

Gambar 4.4	Selisih IPM Kabupaten/Kota Tertinggi dengan Terendah di Kalimantan Timur, 2015-2019 (tahun).....	60
Gambar 4.5	Selisih Usia Harapan Hidup Kabupaten/Kota Tertinggi dan Terendah di Kalimantan Timur, 2015-2019 (tahun).....	61
Gambar 4.6	Selisih Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota Tertinggi dan Terendah di Kalimantan Timur, 2015-2019 (tahun).....	62
Gambar 4.7	Selisih Pengeluaran per Kapita Kabupaten/Kota Tertinggi dan Terendah di Kalimantan Timur, 2015-2019 (ribu rupiah)	63

<https://kaltim.bps.go.id>



Daftar Lampiran

Lampiran 1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi, 2019.....	69
Lampiran 2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi, 2015-2019.....	70
Lampiran 3. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Kalimantan Timur menurut Kabupaten/Kota, 2015-2019	71
Lampiran 4. Umur Harapan Hidup (UHH) Provinsi Kalimantan Timur Menurut Kabupaten/Kota (Tahun), 2015-2019	71
Lampiran 5. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Provinsi Kalimantan Timur Menurut Kabupaten/Kota (Tahun), 2015-2019	72
Lampiran 6. Harapan Lama Sekolah (HLS) Provinsi Kalimantan Timur Menurut Kabupaten/Kota (Tahun), 2015-2019	72
Lampiran 7. Pengeluaran per Kapita Provinsi Kalimantan Timur Menurut Kabupaten/Kota (Ribu Rupiah/Kapita/Tahun), 2015-2019	73
Lampiran 8. Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Umur Harapan Hidup (UHH), Rata-rata Lama Sekolah (RLS), Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Pengeluaran Per Kapita Per Tahun Provinsi Kalimantan Timur menurut Kabupaten/Kota, 2019.....	73
Lampiran 9. Indeks Pembangunan Manusia, Umur Harapan Hidup, Rata-rata Lama Sekolah, Harapan Lama Sekolah, dan Pengeluaran Per Kapita Per Tahun Provinsi Kalimantan Timur, 2015-2019	73
Lampiran 10. Indeks Pembangunan Manusia, Umur Harapan Hidup, Rata-rata Lama Sekolah, Harapan Lama Sekolah, dan Pengeluaran Per Kapita Per Tahun Kabupaten Paser, 2015-2019	74
Lampiran 11. Indeks Pembangunan Manusia, Umur Harapan Hidup, Rata-rata Lama Sekolah, Harapan Lama Sekolah, dan Pengeluaran Per Kapita Per Tahun Kabupaten Kutai Barat, 2015-2019	74

Lampiran 12. Indeks Pembangunan Manusia, Umur Harapan Hidup, Rata-rata Lama Sekolah, Harapan Lama Sekolah, dan Pengeluaran Per Kapita Per Tahun Kabupaten Kutai Kartanegara, 2015-2019	74
Lampiran 13. Indeks Pembangunan Manusia, Umur Harapan Hidup, Rata-rata Lama Sekolah, Harapan Lama Sekolah, dan Pengeluaran Per Kapita Per Tahun Kabupaten Kutai Timur, 2015-2019	75
Lampiran 14. Indeks Pembangunan Manusia, Umur Harapan Hidup, Rata-rata Lama Sekolah,Harapan Lama Sekolah, dan Pengeluaran Per Kapita Per Tahun Kabupaten Berau, 2015-2019	75
Lampiran 15. Indeks Pembangunan Manusia, Umur Harapan Hidup, Rata-rata Lama Sekolah, Harapan Lama Sekolah, dan Pengeluaran Per Kapita Per Tahun Kabupaten Penajam Paser Utara, 2015-2019	76
Lampiran 16. Indeks Pembangunan Manusia, Umur Harapan Hidup, Rata-rata Lama Sekolah, Harapan Lama Sekolah, dan Pengeluaran Per Kapita Per Tahun Kabupaten Mahakam Ulu, 2015-2019	76
Lampiran 17. Indeks Pembangunan Manusia, Umur Harapan Hidup, Rata-rata Lama Sekolah, Harapan Lama Sekolah, dan Pengeluaran Per Kapita Per Tahun Kota Balikpapan, 2015-2019	76
Lampiran 18. Indeks Pembangunan Manusia, Umur Harapan Hidup, Rata-rata Lama Sekolah, Harapan Lama Sekolah, dan Pengeluaran Per Kapita Per Tahun Kota Samarinda, 2015-2019	76
Lampiran 19. Indeks Pembangunan Manusia, Umur Harapan Hidup, Rata-rata Lama Sekolah, Harapan Lama Sekolah, dan Pengeluaran Per Kapita Per Tahun Kota Bontang, 2015-2019	77

BAB I

PEMBANGUNAN MANUSIA SEBAGAI TUJUAN



BAB I Pembangunan Manusia Sebagai Tujuan

Konsep Dasar Pembangunan Manusia

Pembangunan manusia merupakan model pembangunan yang menurut *United Nations Development Programme* (UNDP) ditujukan untuk memperluas pilihan-pilihan yang dapat ditumbuhkan melalui upaya pemberdayaan penduduk. Pada prinsipnya, pilihan manusia tidak terbatas dan terus berubah setiap saat. Tetapi pada semua level pembangunan, ada tiga pilihan yang paling mendasar yaitu untuk berumur panjang dan hidup sehat, untuk memperoleh pendidikan dan untuk memiliki akses terhadap sumber-sumber kebutuhan agar hidup secara layak. Apabila ketiga hal mendasar tersebut tidak dimiliki, maka pilihan lain tidak dapat diakses. Pembangunan manusia tidak hanya sebatas hal tersebut. Terdapat beberapa pilihan tambahan lainnya, mulai dari politik, kebebasan ekonomi dan sosial, sehingga memiliki peluang untuk menjadi kreatif dan produktif, serta juga dapat menikmati harga diri pribadi dan jaminan hak asasi manusia.

Pembangunan manusia sejatinya memiliki makna yang luas. Namun, ide dasar pembangunan manusia itu sendiri yaitu pertumbuhan positif dalam bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, dan lingkungan, serta perubahan dalam kesejahteraan manusianya. Ide dasar ini memiliki fokus kepada manusia dan kesejahteraannya. *United Nations Development Programme* (UNDP) menempatkan manusia sebagai kekayaan bangsa yang sesungguhnya. Oleh karena itu, tujuan utama dari pembangunan adalah menciptakan lingkungan yang memungkinkan bagi rakyatnya untuk menikmati umur panjang, sehat dan menjalankan kehidupan yang produktif. Hal ini tampaknya merupakan suatu kenyataan yang sederhana. Tetapi hal ini seringkali terlupakan oleh berbagai kesibukan jangka pendek untuk mengumpulkan harta dan uang, atau hanya berorientasi pada aspek ekonomi saja (*Human Development Report 1990*).

Pembangunan manusia memiliki dua sisi. Pertama, pembentukan kapabilitas manusia seperti peningkatan kesehatan, pendidikan, dan kemampuan. Kedua, penggunaan kapabilitas yang mereka miliki seperti untuk menikmati waktu luang, untuk tujuan produktif atau aktif dalam kegiatan



budaya, sosial, dan urusan politik. Apabila skala pembangunan manusia tidak seimbang, kemungkinan akan terjadi ketidakstabilan.

Berdasarkan konsep pembangunan manusia, pendapatan merupakan salah satu pilihan yang harus dimiliki. Akan tetapi, pembangunan bukan sekedar perluasan pendapatan dan kesejahteraan. Pembangunan manusia harus berfokus pada manusia, sebagai obyek pembangunan (UNDP, 1996).

Dalam *Human Development Report 1996*, UNDP mendefinisikan pembangunan manusia sebagai proses dimana masyarakat dapat memperluas berbagai pilihan-pilihannya. Pendapatan merupakan salah satu faktor penentu pilihan, tetapi terdapat juga beberapa faktor yang lebih penting lainnya, yaitu kesehatan, pendidikan, lingkungan fisik yang baik serta kebebasan dalam bertindak.

Laporan tersebut juga memuat cakupan dimensi dalam pembangunan manusia, yaitu:

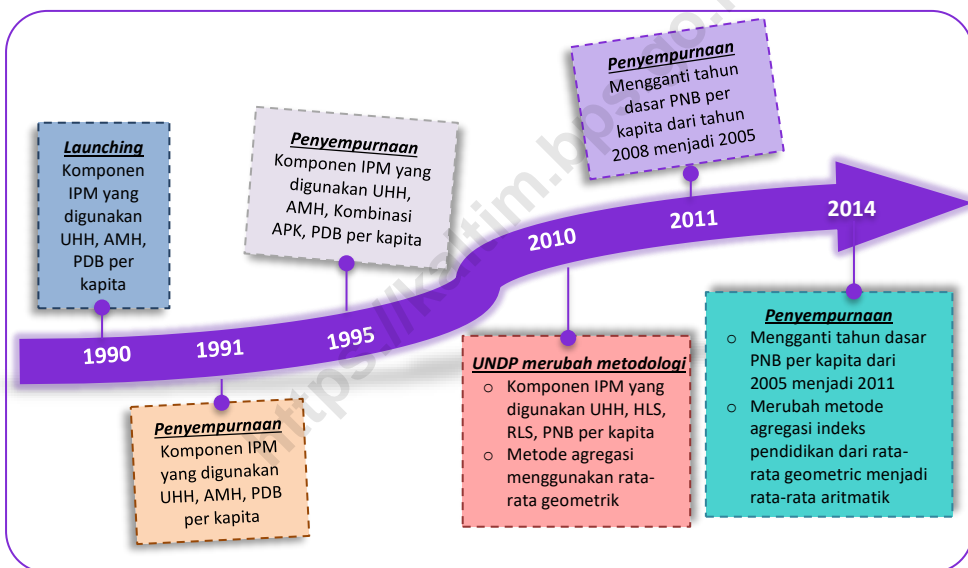
- Pemberdayaan yang dipengaruhi oleh kapabilitas, setiap orang bebas untuk melakukan sesuatu tetapi jika tidak memiliki kapabilitas maka tidak akan menikmati kebebasan tersebut.
- Dengan bekerja sama maka akan tercipta perluasan pilihan seseorang. Dengan demikian pembangunan manusia tidak hanya fokus pada individual tetapi juga pada bagaimana kehidupan sosialnya.
- Kesetaraan yang bermakna kesamaan peluang atau kesempatan.
- Keberlanjutan yang bermakna kesamaan peluang atau kesempatan antar generasi.
- Keamanan dari berbagai aspek tidak hanya aman dari bencana tetapi juga dari ancaman lainnya.

Pengukuran Pembangunan Manusia

Pembangunan manusia menggunakan pengukuran yang sudah dikenalkan oleh UNDP pada tahun 1990, yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pada *Human Development Report 1990* diperkenalkan tiga indikator pembentuk indeks pembangunan manusia yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Dari ketiga dimensi tersebut, diturunkan empat indikator yang digunakan dalam penghitungan IPM, yaitu umur harapan

hidup (UHH), angka melek huruf (AMH), angka partisipasi kasar (APK), dan Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita.

Sejak diperkenalkan pertama kali pada tahun 1990, laporan pembangunan manusia telah dikembangkan, dan yang terakhir adalah penyempurnaan penyusunan IPM menggunakan metode baru pada tahun 2014. Secara berkala UNDP melakukan penyempurnaan dalam perhitungan IPM. Tahun 2010, UNDP melakukan penyempurnaan kembali dengan tetap menggunakan tiga dimensi yang sama yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup layak namun menggunakan indikator yang berbeda yaitu umur harapan hidup saat lahir, rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah, dan Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita.

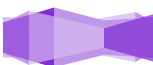


Sumber : Indeks Pembangunan Manusia Metode Baru, 2016

Gambar 1.1 Sejarah Pengukuran IPM

Metode agregasi IPM pun mengalami penyempurnaan, dari rata-rata aritmatik diubah menjadi rata-rata geometric. Adapun metode agregasi untuk indeks pendidikan berubah dari rata-rata-rata geometrik menjadi rata-rata aritmatik. Penyempurnaan metodologi IPM pada tahun 2014 meliputi :

1. Mengganti tahun dasar PNB per kapita dari 2005 menjadi 2011,
2. Mengubah metode agregasi indeks pendidikan dari rata-rata geometrik menjadi rata-rata aritmatik.



Adapun indikator yang berubah adalah :

1. Angka Melek Huruf (AMH) pada metode lama diganti dengan Angka Harapan Lama Sekolah (HLS)
2. Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita diganti dengan Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita.

Tabel 1.1 Perubahan Pengukuran IPM

Uraian		Indikator	
		1990	2010
Dimensi	Kesehatan	Angka Harapan Hidup saat lahir (AHH)	Angka Harapan Hidup saat lahir (AHH)
	Pendidikan	Angka Melek Huruf (AMH)	Harapan Lama Sekolah (HLS)
		Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)
Standar Hidup	PDB per kapita	PNB per kapita	
Agregasi Indeks		Rata-rata Hitung	Rata-rata Ukur/Geometrik

Sumber : Indeks Pembangunan Manusia Metode Baru, 2016

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi salah satu indikator penting dalam melihat sisi lain dari pembangunan. Manfaat IPM antara lain sebagai berikut:

- IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk),
- IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/Negara,
- Bagi Indonesia, IPM merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja Pemerintah, IPM juga digunakan sebagai salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU).

Badan Pusat Statistik menghitung Indeks Pembangunan Manusia pada tingkat regional, yaitu provinsi dan kabupaten/kota. Selanjutnya untuk memantau keterbandingannya dengan capaian nasional, juga dihitung angka IPM Indonesia. Metode penghitungan IPM yang digunakan BPS mengacu pada metodologi yang digunakan UNDP dengan penyesuaian pada beberapa indikator sesuai ketersediaan data sampai tingkat kabupaten/kota.

Di Indonesia, IPM mulai dihitung pada tahun 1996. Sejak saat itu, IPM dihitung secara berkala setiap tiga tahun. Mulai tahun 2004, IPM dihitung setiap tahun untuk memenuhi kebutuhan Kementerian Keuangan dalam menghitung Dana Alokasi Umum (DAU). Indikator yang digunakan dalam penghitungan IPM di Indonesia sampai saat ini sudah mengacu pada metode baru yang diterapkan oleh UNDP dengan beberapa penyesuaian. Indikator pengeluaran per kapita tetap digunakan dalam penghitungan. Metode baru diaplikasikan di Indonesia sejak tahun 2014 dengan angka *backcasting* dari tahun 2010.

Pembangunan Manusia dalam SDGs

Sustainable Development Goals (SDGs) atau dikenal dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) merupakan agenda pembangunan global yang disepakati oleh negara-negara di dunia hingga tahun 2030. TPB mencakup tujuh belas tujuan, yaitu: (1) Tanpa Kemiskinan; (2) Tanpa Kelaparan; (3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera; (4) Pendidikan Berkualitas; (5) Kesetaraan Gender; (6) Air Bersih dan Sanitasi Layak; (7) Energi Bersih dan Terjangkau; (8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi; (9) Industri, Inovasi dan Infrastruktur; (10) Berkurangnya Kesenjangan; (11) Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan; (12) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab; (13) Penanganan Perubahan Iklim; (14) Ekosistem Lautan; (15) Ekosistem Daratan; (16) Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh; dan (17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.



Gambar 1.2 Sustainable Development Goals

Secara eksplisit, dari 319 indikator TPB nasional, pembangunan manusia tidak langsung menjadi tujuan. Namun, selanjutnya terdapat beberapa target yang menyinggung tentang pembangunan manusia yaitu tujuan ketiga, tujuan keempat, dan tujuan kedelapan.

Tujuan ketiga adalah menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan penduduk di segala usia. Pada target 3.1, tertulis komitmen bahwa pada tahun 2030, rasio angka kematian ibu akan menurun hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup. Target ini bertujuan mengakhiri kematian anak, kematian ibu, dan kematian akibat penyakit pada penduduk usia kurang dari 70 tahun. Jika dikaitkan dengan salah satu indikator pembentuk IPM, umur harapan hidup saat lahir akan menjadi salah satu indikator dari SDGs. Umur harapan hidup saat lahir akan meningkat jika salah satu indikator SDGs yaitu angka kematian neonatal dapat ditekan.

Tujuan keempat adalah menjamin kualitas pendidikan yang adil dan inklusif serta meningkatkan kesempatan belajar seumur hidup untuk semua. Pada target 4.1, terdapat komitmen untuk memastikan bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menerima pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif. Pada target ini, beberapa indikator yang menjadi target antara lain:

- Proporsi anak dan remaja yang mencapai standar kemampuan minimum dalam membaca dan matematika
- Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat
- Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat
- Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat
- Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥ 15 tahun.

Apabila target 4.1 dapat dicapai, maka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah yang merupakan salah satu indikator penghitungan IPM akan ikut meningkat, sebab angka kelulusan pendidikan dasar dan menengah akan berdampak terhadap harapan lama sekolah. Dalam jangka panjang, rata-rata lama sekolah juga akan meningkat karena peningkatan kapasitas pendidikan dasar dan menengah.

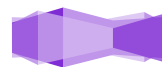
Tujuan kedelapan yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkelanjutan, tenaga kerja yang optimal dan produktif, serta pekerjaan yang layak untuk semua. Dalam tujuan kedelapan, terdapat target 8.1 yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) minimal 7 persen per tahun di negara-negara berkembang. Salah satu indikator dari target ini adalah meningkatkan Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita. Dengan meningkatnya PNB per kapita, secara tidak langsung akan menaikkan pengeluaran per kapita. Pada target 8.3, setiap negara mendorong terciptanya pekerjaan yang layak dengan tingkat pendapatan yang lebih baik bagi semua. Dengan meningkatnya tingkat pendapatan, secara tidak langsung akan berdampak terhadap peningkatan pengeluaran per kapita.

Melalui SDGs, tujuan dan target pembangunan manusia terus diupayakan peningkatannya. Pada akhirnya, dapat disimpulkan bahwa pembangunan manusia dapat diwujudkan melalui pencapaian target SDGs.

Pembangunan Manusia dalam Dokumen Perencanaan Daerah

Rumusan visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Kalimantan Timur periode 2018–2023 berpijak pada nilai yang berkembang di masyarakat, visi dan tahapan pembangunan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Timur periode 2005–2025, capaian kondisi pembangunan daerah, serta proyeksi pembangunan lima tahun mendatang. Rencana Pembangunan Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Timur 2005–2025 memiliki visi “Terwujudnya Masyarakat yang Adil dan Sejahtera dalam Pembangunan Berkelanjutan”. Visi tersebut didukung oleh berbagai misi berikut:

1. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia Kalimantan Timur yang mandiri, berdaya saing tinggi dan berakhlak mulia;
2. Mewujudkan struktur ekonomi yang handal dengan partisipasi masyarakat yang seluas-luasnya;
3. Mewujudkan pelayanan dasar bagi masyarakat secara merata dan proporsional;



4. Mewujudkan efisiensi dan efektivitas pemerintahan yang partisipatif berbasis penegakan hukum; dan
5. Mewujudkan pembangunan yang terpadu dan serasi dengan pendekatan pengembangan wilayah berbasis ekonomi dan ekologi.

Kualitas SDM dalam periode ini terwujud dalam kemandirian masyarakat yang telah mencapai tingkat mapan, dan berdaya saing tinggi. Upaya yang dilakukan untuk mencapai kondisi tersebut terdiri dari beberapa prioritas, antara lain:

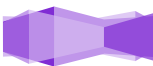
- a. Pelaksanaan pendidikan 12 tahun dan pendidikan tinggi dengan mengembangkan sekolah unggulan dan sekolah berbasis kejuruan di seluruh wilayah bertujuan mewujudkan kualitas pendidikan umum di atas rata-rata nasional dan pendidikan bertaraf internasional;
- b. Pengembangan litbang dan iptek agar terwujudnya pemanfaatan jasa dan produk tersebut sebagai dasar pengambilan keputusan publik pada lembaga pemerintah dan swasta;
- c. Peningkatan derajat kesehatan dan pelayanan kesehatan yang terdistribusi dengan baik di seluruh wilayah ditandai dengan semakin tingginya usia harapan hidup rata-rata masyarakat yang mencapai di atas rata-rata nasional, jumlah kematian ibu saat melahirkan kecil, wabah semakin dini dapat di atasi, dan perilaku hidup sehat masyarakat juga semakin baik;
- d. Peningkatan kualitas tenaga kerja masyarakat setempat baik dalam pengetahuan maupun keahlian spesifik sesuai bidang pembangunan ditandai menurunnya angka pengangguran dan peningkatan produktivitas kerja;
- e. Peningkatan partisipasi wanita dalam berbagai bidang pembangunan dan kesetaraan gender ditandai peningkatan peran wanita dalam politik, pemerintahan dan berbagai kegiatan masyarakat;
- f. Pengembangan peran pemuda dalam bidang organisasi kemasyarakatan, seni dan olahraga terwujud dengan semakin banyaknya organisasi kepemudaan bukan hanya tingkat kabupaten/kota melainkan sampai tingkat kecamatan dan desa;
- g. Peningkatan prestasi bidang olahraga unggulan ditandai dengan peningkatan peringkat dalam skala nasional, semakin banyaknya

pertandingan dan ekshibisi dan bertambahnya organisasi kepemudaan berbasis olahraga;

- h. Peningkatan kegiatan keagamaan oleh masyarakat, perkembangan fasilitas peribadatan sesuai kebutuhan masing-masing pemeluk agama serta pengembangan sekolah keagamaan yang terdistribusi ke berbagai daerah guna mewujudkan kerukunan antar umat beragama;

Penyantunan berbagai kebutuhan masyarakat yang kurang beruntung dan peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat ditandai semakin berkurangnya anak terlantar dan anak asuh.

<https://kaltim.bps.go.id>



BAB II

POTRET PEMBANGUNAN MANUSIA DI KALIMANTAN TIMUR



BAB II Potret Pembangunan Manusia Kalimantan Timur

Pembangunan Manusia Kalimantan Timur pada Tatatan Nasional

Pembangunan manusia merupakan isu strategis yang capaiannya perlu dipantau. Untuk memonitor pencapaian pembangunan manusia antar wilayah di Indonesia, BPS menghitung IPM pada tingkat regional sejak tahun 1996, yaitu pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Dan untuk memantau keterbandingannya dengan capaian nasional, dihitung pula angka IPM Indonesia.

Pembangunan manusia di Indonesia terus mengalami kemajuan. Pada tahun 2019, IPM Indonesia telah mencapai 71,92, sehingga pembangunan manusia di Indonesia masih berstatus “sedang”. Angka ini meningkat sebesar 0,53 poin atau tumbuh sebesar 0,74 persen dibandingkan tahun 2018. Pencapaian pembangunan manusia di tingkat provinsi cukup bervariasi. IPM pada level provinsi berkisar antara 60,84 (Papua) hingga 80,76 (DKI Jakarta).

Pada tahun 2019 ini, Provinsi DKI Jakarta tercatat berstatus pembangunan manusia “sangat tinggi” sekaligus merupakan satu-satunya provinsi di Indonesia yang mencapai status “sangat tinggi”. Pada tahun 2019 terdapat 22 provinsi yang memiliki status pembangunan “tinggi” dan 11 provinsi memiliki status pembangunan “sedang” dan sudah tidak ada provinsi yang berstatus “rendah”.

Berdasarkan penghitungan dengan metode baru, tercatat IPM Kalimantan Timur tahun 2010 sebesar 71,31. Angka ini terus meningkat setiap tahunnya sehingga mencapai angka 76,61 pada tahun 2019. Dengan capaian IPM ini, pembangunan manusia di Kalimantan Timur berstatus “tinggi”. Pada tatanan nasional, capaian pembangunan manusia di Indonesia hampir mirip dengan 21 provinsi lainnya di Indonesia.





1 PROV 2018: 1	Sangat Tinggi (IPM ≥ 80)	11 PROV 2018: 12	Sedang (60 ≤ IPM < 70)
	DKI Jakarta (Tertinggi)		Lampung, NTB, NTT, Kalbar, Sulteng, Gorontalo, Sulbar, Maluku, Malut, Pabar, Papua (Terendah)
22 PROV 2018: 21	Tinggi (70 ≤ IPM < 80)	- PROV 2018: -	Rendah (IPM < 60)
	Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Jambi, Sumsel, Bengkulu, Kep. Babel, Kep. Riau, Jabar, Jateng, DI Yogyakarta, Jatim, Banten, Bali, Kalteng, Kalsel, Kaltim, Kaltara, Sulut, Sulsel, Sultra		

Sumber: Badan Pusat Statistik

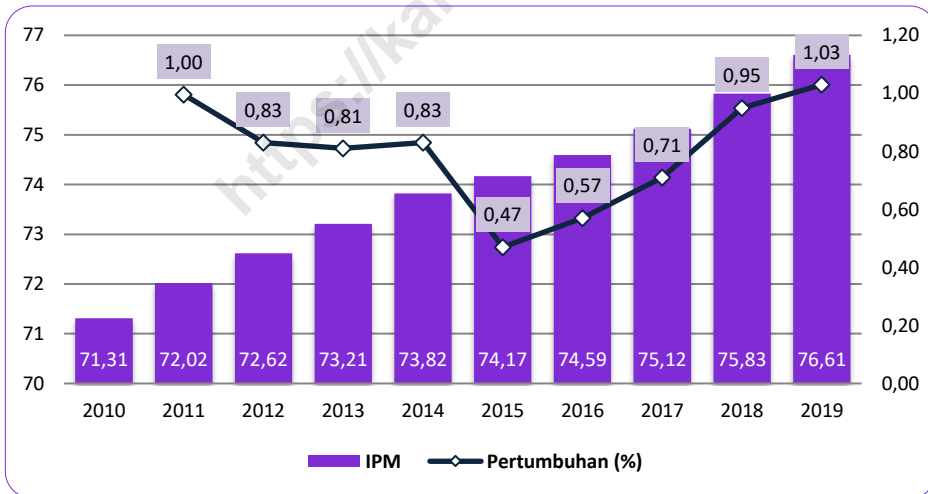
Gambar 2.1 Peta IPM di Indonesia, 2019

Pembangunan Manusia di Provinsi Kalimantan Timur Terus Meningkat

Provinsi Kalimantan Timur terbagi habis menjadi 10 (sepuluh) kabupaten/kota, yang terdiri dari 7 (tujuh) wilayah kabupaten dan 3 (tiga) wilayah kota. Berdasarkan Proyeksi Penduduk Indonesia 2010–2035 hasil Sensus Penduduk 2010, Jumlah penduduk Kalimantan Timur Tahun 2019 tercatat 3.721.389 jiwa yang terdiri dari 1.950.883 laki-laki dan 1.770.509 perempuan. Kepadatan penduduknya tahun 2018 sekitar 30 penduduk per kilometer persegi (km²), dengan capaian pembangunan manusia yang terus meningkat. Untuk melihat lebih dalam sejauh mana pembangunan manusia di wilayah Provinsi Kalimantan Timur, perlu diketahui Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari tahun ke tahun.

Selama kurun waktu 2010-2019, IPM Kalimantan Timur terus menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2010, IPM Kalimantan Timur tercatat sebesar 71,31 kemudian meningkat menjadi 72,02 tahun 2011, kemudian naik lagi menjadi 72,62 tahun 2012 dan 73,21 tahun 2013. Selanjutnya pada tahun 2014, IPM Kalimantan Timur meningkat lagi menjadi 73,82 dan tahun 2015 mencapai angka 74,17, terus naik menjadi 74,59 tahun 2016, tahun 2017 semakin meningkat menjadi 75,12 dan tahun 2018 meningkat lagi menjadi 75,83 hingga pada 2019 mencapai 76,61. Dengan demikian dalam kurun waktu delapan tahun, telah terjadi kenaikan IPM sebesar 5,30 poin.

Capaian ini merupakan agregasi dari tiga dimensi, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup layak. Untuk menghitung dimensi umur panjang dan hidup sehat, digunakan indikator Umur Harapan Hidup (UHH) saat lahir. Sedangkan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS) merupakan indikator yang mewakili dimensi pengetahuan. Selanjutnya, dimensi standar hidup layak diwakili oleh indikator Pengeluaran Per kapita Disesuaikan.



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur

Gambar 2.2 Perkembangan Indeks Pembangunan Kalimantan Timur, 2010-2019



Pertumbuhan IPM tertinggi terjadi pada tahun 2018-2019 yaitu 1,03 persen atau naik sekitar 0,78 poin. Sedangkan pertumbuhan IPM terendah terjadi pada tahun 2014-2015 sekitar 0,48 persen atau meningkat sekitar 0,35 poin dari tahun 2014-2015. Perkembangan tersebut menunjukkan semakin membaiknya pembangunan manusia di Provinsi Kalimantan Timur.

Tabel 2.1 Klasifikasi Status Pembangunan Manusia

Nilai IPM	Status Pembangunan Manusia
< 60	Rendah
$60 \leq \text{IPM} < 70$	Sedang
$70 \leq \text{IPM} < 80$	Tinggi
≥ 80	Sangat Tinggi

Sumber: Badan Pusat Statistik

Berdasarkan kriteria di atas, tampak bahwa status pembangunan manusia di Provinsi Kalimantan Timur dari tahun 2010-2019 telah berstatus “tinggi”, bahkan sejak awal penghitungan IPM Kalimantan Timur tahun 1996, status pembangunan manusia daerah ini telah berada pada level status “tinggi”. Kecuali pada tahun 1999 statusnya sempat bergeser menjadi “sedang” sebagai imbas dari krisis moneter yang terjadi di Indonesia pada tahun 1998. Selanjutnya dari tahun 2002 sampai saat ini status pembangunan manusia Kalimantan Timur tetap berada pada level kategori “tinggi”.

Tabel 2.2 Komponen dan Nilai IPM Kalimantan Timur, 2019

Komponen	Nilai
Umur Harapan Hidup Saat Lahir (tahun)	74,22
Harapan Lama Sekolah (tahun)	13,69
Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	9,70
Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (Rupiah/Orang/Tahun)	12 359
IPM (Indeks Pembangunan Manusia)	76,61

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur

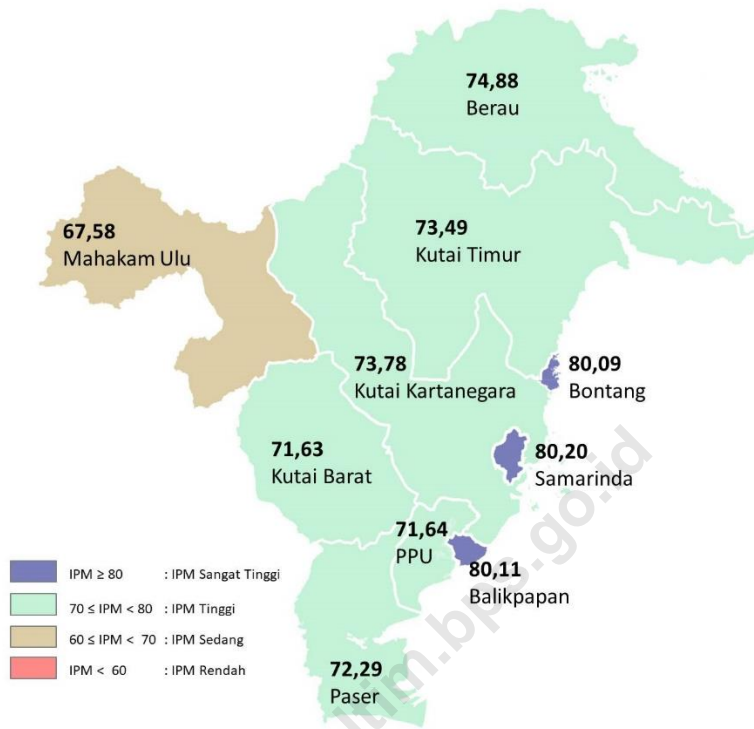
Kemajuan pembangunan manusia di Kalimantan Timur tersebut didorong oleh kemajuan indikator pembentuk IPM. Umur harapan hidup saat lahir di Kalimantan Timur tahun 2019 telah mencapai lebih dari 74 tahun, sementara secara rata-rata penduduk usia 25 tahun ke atas telah menempuh pendidikan setara dengan kelas IX (tamat SMP), sedangkan anak usia 7 tahun ke atas berpeluang menempuh pendidikan hingga Diploma I. Pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur yang semakin membaik turut meningkatkan pengeluaran per kapita per tahun penduduk Kalimantan Timur.

Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota

Capaian pembangunan manusia di kabupaten/kota se-Provinsi Kalimantan Timur, tampaknya relatif bervariasi, hal ini dapat dilihat dari angka IPM per kabupaten/kota dari tahun ke tahun. Dari sepuluh kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2019, terdapat tiga kota dengan status IPM sangat tinggi, enam kabupaten berstatus tinggi, dan satu kabupaten saja yang masih berstatus sedang. Berdasarkan Gambar 2.2, IPM pada tiga kota di Provinsi Kalimantan Timur berstatus sangat tinggi, Kota Samarinda dengan capaian IPM sebesar 80,20; Kota Balikpapan dengan IPM 80,81 dan Kota Bontang dengan IPM sebesar 80,09.

Sementara nilai IPM kabupaten yang lain cukup variatif, terdapat enam kabupaten berstatus tinggi, dimulai dari Kabupaten Berau dengan IPM 74,88; Kabupaten Kutai Kartanegara dengan IPM 73,78; Kabupaten Kutai Timur dengan IPM 73,49; Kabupaten Paser dengan IPM 72,29; Kabupaten Penajam Paser Utara dengan IPM 71,64 dan Kabupaten Kutai Barat dengan IPM sebesar 71,63. Sedangkan satu-satunya kabupaten dengan status IPM sedang yakni Kabupaten Mahakam Ulu dengan IPM sebesar 67,58.

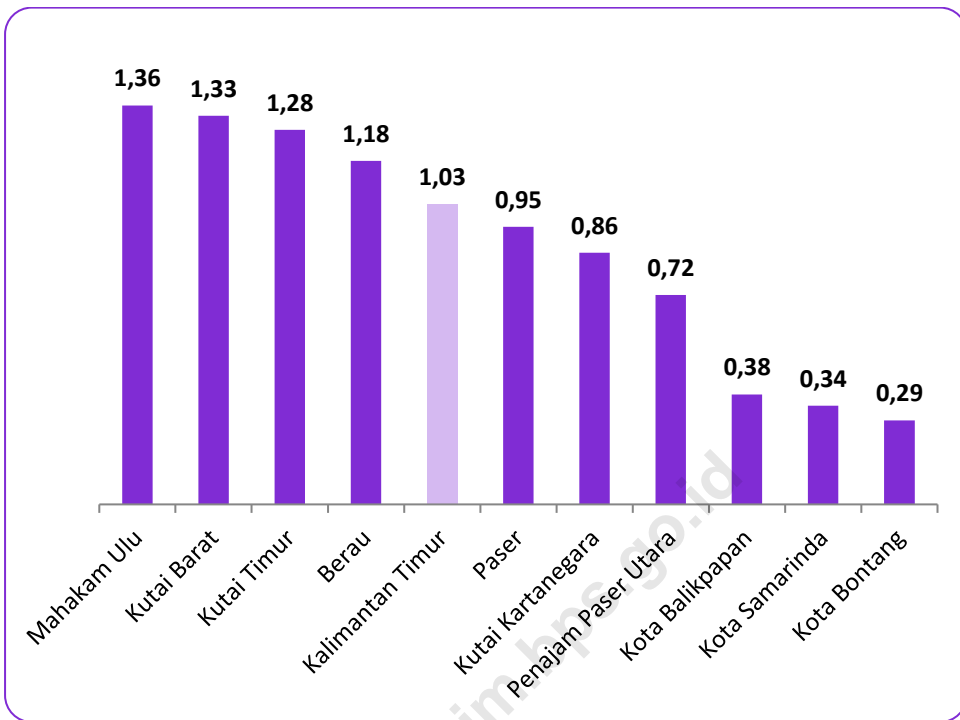




Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur

Gambar 2.3 Peta IPM Kalimantan Timur, 2019

Kemajuan capaian pembangunan manusia juga dapat dilihat dari kecepatan pembangunan manusia, sebagai cerminan upaya yang dilakukan untuk mencapai suatu target tertentu dalam pembangunan manusia. Secara umum, semakin tinggi nilai IPM suatu wilayah, maka tingkat pertumbuhannya akan relatif lebih kecil dibandingkan wilayah lain dengan nilai IPM masih relatif rendah. Kecepatan pembangunan manusia yang diukur dengan pertumbuhan IPM menunjukkan bahwa pada periode 2018-2019 Kabupaten Mahakam Ulu menempati posisi pertama dengan pertumbuhan IPM sebesar 1,36 persen, posisi kedua ditempati oleh Kabupaten Kutai Barat sebesar 1,33 persen, disusul oleh Kabupaten Kutai Timur sebesar 1,28 persen dan Kabupaten Berau sebesar 1,18 persen. Sedangkan untuk enam kabupaten/kota lain pertumbuhannya berada di bawah 1 persen.



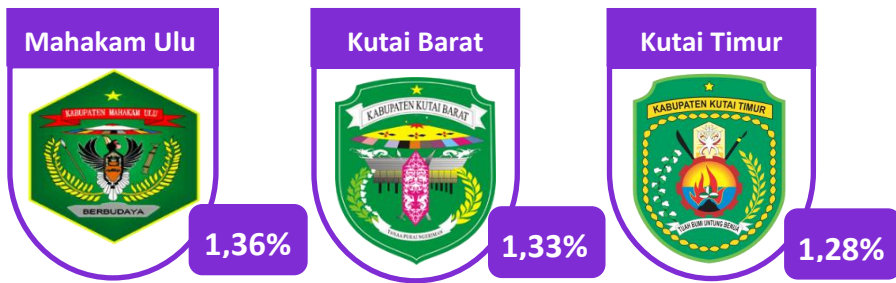
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur

Gambar 2.4 Pertumbuhan IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur, 2018-2019 (persen)

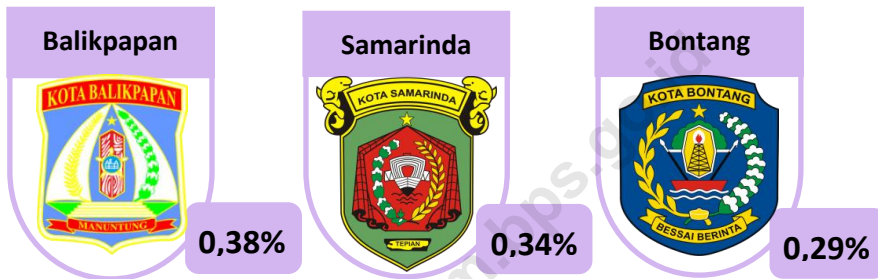
Pertumbuhan yang lebih cepat pada wilayah dengan level IPM yang relatif lebih rendah tersebut mengindikasikan adanya konvergensi kondisi pembangunan manusia di wilayah Kalimantan Timur. Wilayah-wilayah dengan level IPM yang relatif rendah tersebut berpotensi untuk dapat mengejar ketertinggalan wilayah kabupaten/kota lainnya yang tingkat pembangunan manusianya sudah relatif lebih baik.



Pertumbuhan IPM Tertinggi 2018-2019



Pertumbuhan IPM Terendah 2018-2019



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur

Gambar 2.5 Kabupaten/Kota dengan Pertumbuhan IPM tertinggi dan Terendah, 2019

Secara umum perkembangan pembangunan manusia di seluruh kabupaten/kota di wilayah Provinsi Kalimantan Timur cukup menggembarakan. Dari tahun 2010, tiga kota di Kalimantan Timur telah mencapai IPM lebih dari 75, sedangkan kabupaten yang lainnya telah meraih angka IPM di atas 66. Kemudian dalam tahun 2019, tiga kota di Kalimantan Timur tersebut telah mencapai angka IPM lebih dari 80, dengan kata lain statusnya naik dari “tinggi” menjadi “sangat tinggi”. Dari sepuluh kabupaten/kota di Kalimantan Timur, ada tiga kota dengan capaian IPM lebih tinggi dari IPM Provinsi Kalimantan Timur yaitu: Kota Samarinda, Kota Bontang, dan Kota Balikpapan. Sedangkan tujuh kabupaten lainnya, nilai IPM berada lebih rendah dari IPM Provinsi Kalimantan Timur.

Tabel 2.3 Perubahan Status Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur

Kabupaten/Kota	2018	2019
(1)	(2)	(3)
Paser	Tinggi	Tinggi
Kutai Barat	Tinggi	Tinggi
Kutai Kartanegara	Tinggi	Tinggi
Kutai Timur	Tinggi	Tinggi
Berau	Tinggi	Tinggi
Penajam Paser Utara	Tinggi	Tinggi
Mahakam Ulu	Sedang	Sedang
Kota Balikpapan	Tinggi	Sangat Tinggi
Kota Samarinda	Tinggi	Sangat Tinggi
Kota Bontang	Tinggi	Sangat Tinggi

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur

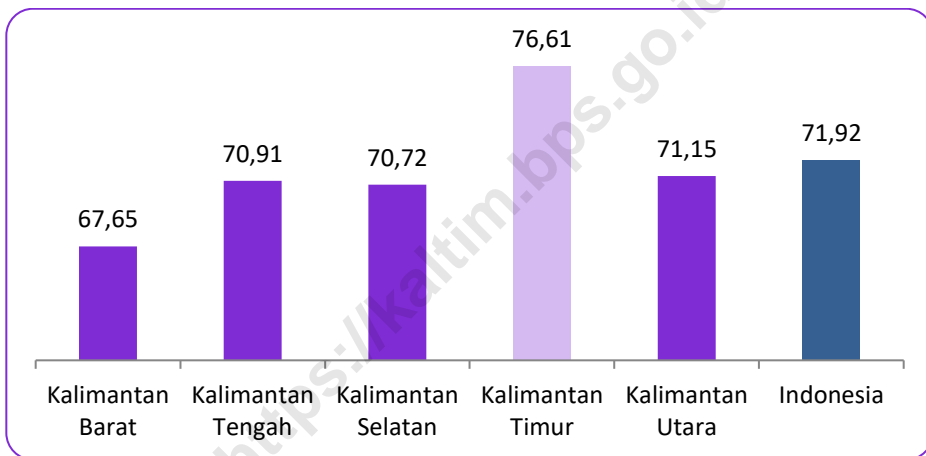
Jika dibandingkan dengan tahun 2018, kondisi IPM untuk kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur tidak terjadi perubahan status pada tahun 2019, yaitu enam kabupaten sudah berstatus IPM dengan kategori “tinggi”, sedangkan Kabupaten Mahakam Ulu status IPM masih dalam kategori IPM “sedang”.

Kota Samarinda, Kota Balikpapan dan Kota Bontang merupakan pusat dari berbagai kegiatan, baik pendidikan, perekonomian, kesehatan, bisnis dan lain-lain. Hal ini yang mendukung ketiga kota tersebut dalam pencapaian pembangunan manusia. Sarana dan prasarana yang tersedia cukup lengkap dan memadai serta kemudahan akses dalam memperoleh pendidikan maupun kesehatan juga ditemui pada ketiga kota tersebut. Kondisi sebaliknya dialami oleh kabupaten Mahakam Ulu, ketersediaan sarana prasarana pendidikan dan kesehatan serta akses untuk mencapainya relatif terbatas. Hal ini terkait juga dengan kondisi geografis Kabupaten Mahakam Ulu yang relatif sulit sehingga berdampak terhadap akses masyarakat pada sarana kesehatan, pendidikan, dan ekonomi.



Perbandingan Antar Wilayah

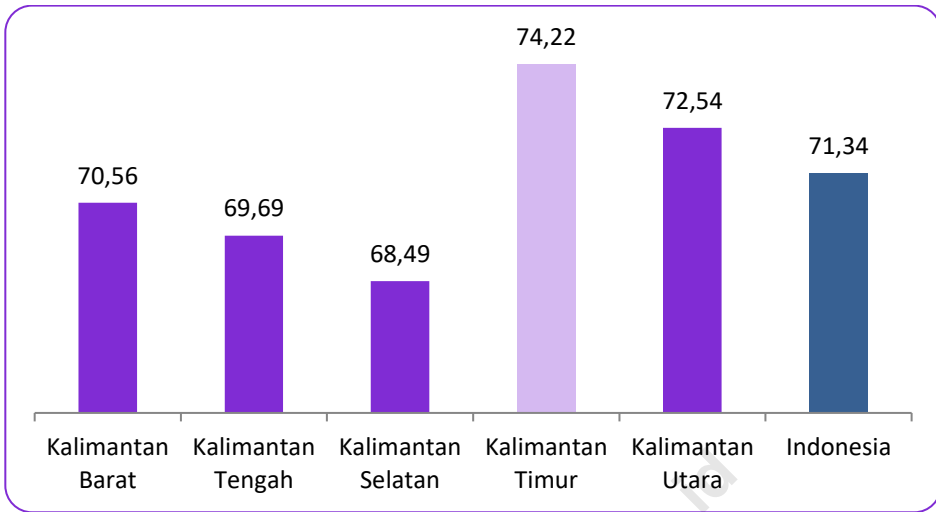
Dibandingkan dengan empat provinsi lainnya di Pulau Kalimantan, capaian pembangunan manusia Kalimantan Timur merupakan yang tertinggi. Pada tahun 2019, angka IPM Provinsi Kalimantan Timur sebesar 76,61 bahkan lebih tinggi dibandingkan angka IPM nasional yang sebesar 71,92. Selain Provinsi Kalimantan Timur, tiga provinsi lainnya yaitu Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Utara angka IPM telah berada di atas 70 namun masih di bawah 80 sehingga keempatnya dikatakan berstatus IPM tinggi. Sementara itu, provinsi Kalimantan Barat menjadi satu-satunya provinsi di Kalimantan yang angka IPM berada di antara 60 – 70, sehingga dikatakan berstatus IPM sedang.



Sumber: Badan Pusat Statistik

Gambar 2.6 Indeks Pembangunan Manusia di Pulau Kalimantan, 2019

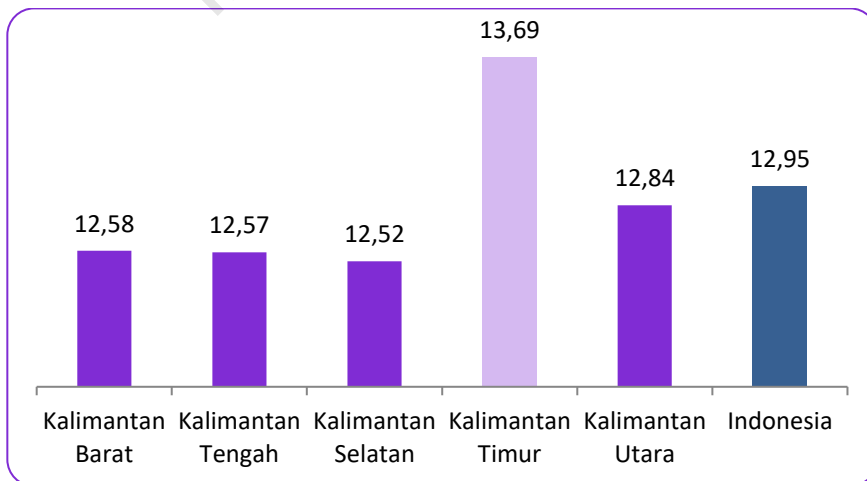
Pada indikator umur harapan hidup (UHH) saat lahir, dibandingkan dengan empat provinsi lainnya di Kalimantan, umur harapan hidup Kalimantan Timur pada tahun 2019 masih lebih tinggi dibandingkan dengan keempat provinsi tetangga. UHH di provinsi Kalimantan Timur mencapai 74,22 tahun, merupakan yang tertinggi di pulau Kalimantan dan melebihi UHH nasional Indonesia (71,34 tahun). Usia harapan hidup di Provinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan Utara juga telah mencapai masing-masing 70,56 tahun dan 72,54 tahun. Sedangkan dua provinsi lainnya, yaitu Provinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan, angka usia harapan hidup di sana masih berada di bawah 70 tahun, masing-masing 69,69 tahun dan 68,49 tahun.



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur

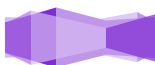
Gambar 2.7 Umur Harapan Hidup di Pulau Kalimantan, 2019 (tahun)

Indikator berikutnya yang mewakili dimensi pengetahuan yaitu harapan lama sekolah (HLS) dan rata-rata lama sekolah (RLS). Di Pulau Kalimantan, Provinsi Kalimantan Timur menjadi satu-satunya provinsi yang angka HLSnya mencapai lebih dari 13 tahun, tepatnya 13,69 tahun atau setara dengan tamat pendidikan Diploma I (D1). Sementara itu, keempat provinsi lainnya baru mencapai 12 tahun atau setara dengan tamat pendidikan SMA, sama dengan kisaran angka HLS nasional Indonesia (12,95 tahun).

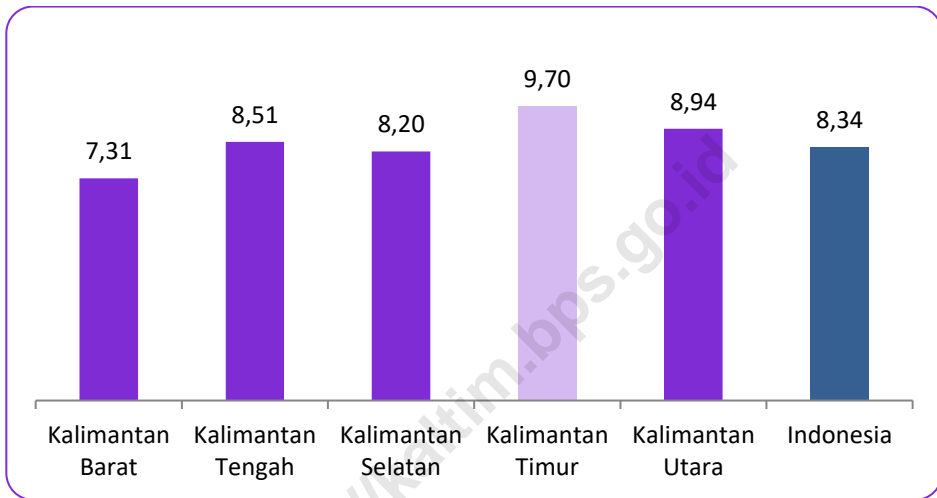


Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur

Gambar 2.8 Harapan Lama Sekolah di Pulau Kalimantan, 2019 (tahun)



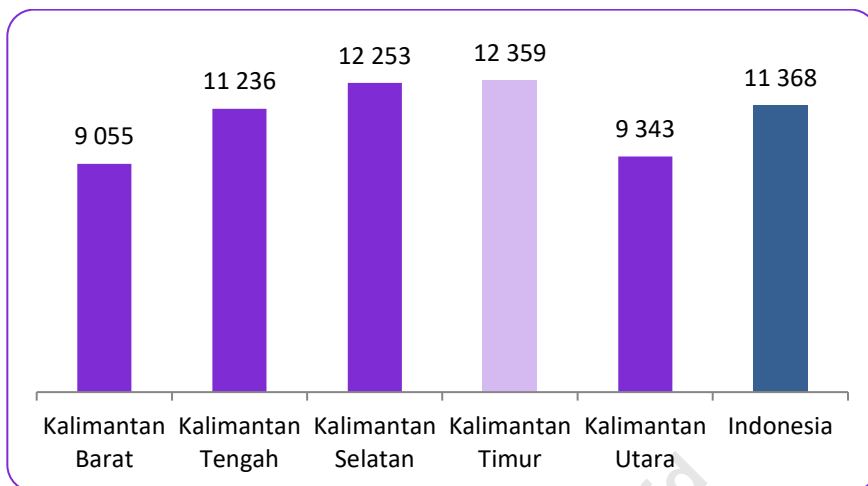
Ditilik dari indikator rata-rata lama sekolah (RLS), untuk di Pulau Kalimantan, hanya Provinsi Kalimantan Timur yang angka RLSnya telah mencapai lebih dari 9 tahun, tepatnya 9,70 tahun yang berarti setara dengan tamat pendidikan SMP. Sementara itu, provinsi Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Utara masih berada di kisaran 8 tahun, bahkan provinsi Kalimantan Barat masih berada pada kisaran 7 tahun. Sementara itu, untuk angka nasional berada pada kisaran 8 tahun, tepatnya yaitu 8,34 tahun.



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur

Gambar 2.9 Rata-rata Lama Sekolah di Pulau Kalimantan, 2019 (tahun)

Dimensi standar hidup layak merupakan representasi dari kesejahteraan yang diwakili oleh indikator pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Pada tahun 2019, pengeluaran per kapita di Provinsi Kalimantan Timur telah mencapai 12,36 juta rupiah per tahun, lebih tinggi daripada pengeluaran per kapita Indonesia (11,37 juta rupiah) dan empat provinsi lainnya yang ada di pulau Kalimantan. Pengeluaran per kapita terbesar kedua di pulau Kalimantan dipegang oleh provinsi Kalimantan Selatan sebesar 12,25 juta rupiah, disusul oleh Provinsi Kalimantan Tengah sebesar 11,24 juta rupiah. Sementara itu, pengeluaran per kapita di provinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan Utara masih berada di bawah 10 juta rupiah per tahun, masing-masing 9,06 juta rupiah dan 9,34 juta rupiah.



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur

Gambar 2.10 Pengeluaran Per Kapita di Pulau Kalimantan, 2019 (ribu rupiah)

<https://kaltim.bps.go.id>



BAB III

KEMAJUAN PEMBANGUNAN MANUSIA: CAPAIAN DAN TANTANGAN



BAB III Kemajuan Pembangunan Manusia: Capaian dan Tantangan

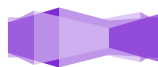
Kualitas sumber daya manusia yang baik merupakan modal dasar pembangunan suatu wilayah. Dengan SDM yang berkualitas, perekonomian suatu negara dapat berkembang secara optimal. Selama periode 2010-2019, pembangunan di Kalimantan Timur terus mengalami peningkatan. Meski demikian masih terdapat beberapa tantangan yang perlu ditingkatkan baik dari sisi kesehatan, pendidikan, maupun ekonomi.

Kesempatan Hidup yang Lebih Lama

Dimensi pertama pembentuk IPM adalah umur panjang dan hidup sehat yang diukur dengan umur harapan hidup (UHH) saat lahir. Umur harapan hidup saat lahir merupakan indikator yang dapat mencerminkan derajat kesehatan suatu wilayah, baik dari sarana prasarana, akses, hingga kualitas kesehatan.

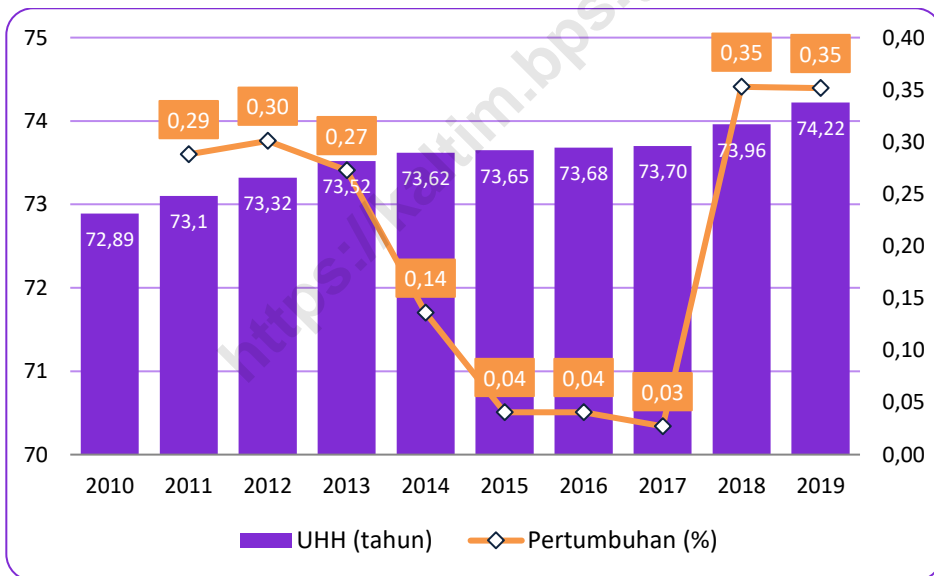
Hasil dari pencapaian pembangunan masyarakat dapat diukur dengan melihat seberapa jauh masyarakat di daerah tersebut telah memanfaatkan sumber dayanya yang mampu memberikan fasilitas kepada warganya agar menjadi lebih cerdas. Dengan kecerdasan masyarakat diharapkan dapat menata hidup sehat, karena hidup sehat dan cerdas diyakini akan meningkatkan kemampuan produktivitas seseorang sehingga dapat berumur panjang dan sehat.

Seseorang yang dapat menikmati umur panjang bukan semata-mata upaya dari pribadi yang bersangkutan, akan tetapi juga seberapa jauh upaya masyarakat atau pemerintah dengan penggunaan sumber daya yang tersedia mampu untuk memperpanjang umur penduduknya. Oleh karena itu pemanfaatan sumber daya masyarakat perlu diarahkan pada pembinaan kesehatan agar warganya senantiasa berperilaku hidup sehat sehingga dapat menikmati umur panjang dan sehat.



Hidup lebih lama dan sehat menjadi dambaan setiap manusia di dunia ini. Kesehatan adalah hal penting dalam kehidupan ini, karena untuk dapat berumur panjang diperlukan kesehatan yang lebih baik. Umur harapan hidup saat lahir adalah salah satu indikator gambaran kesehatan masyarakat di suatu wilayah tertentu.

Dalam menjalani kehidupan ini yang terpenting dijaga adalah kesehatan, dengan jiwa dan raga yang sehat memudahkan kita beraktivitas. Hidup lebih lama yang menjadi dambaan hampir semua orang adalah hidup lebih lama dan sehat. Secara teori, seseorang dapat bertahan hidup lebih lama apabila dia sehat, sehingga apabila seseorang sakit akan berupaya melakukan tindakan untuk mempercepat penyembuhan agar dia bisa bertahan hidup lebih lama. Umur harapan hidup saat lahir merupakan rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup.

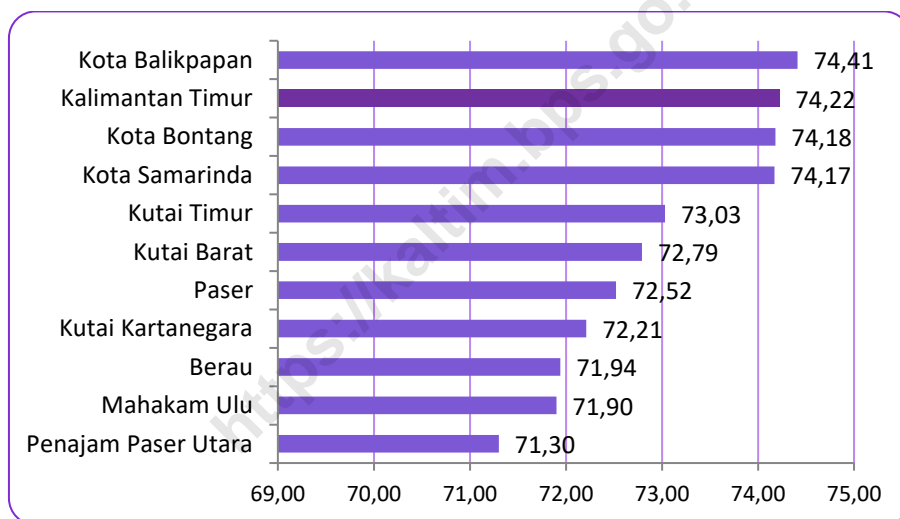


Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur

Gambar 3.1 Umur Harapan Hidup Kalimantan Timur, 2010-2019

Dalam kurun waktu 2010-2019, umur harapan hidup saat lahir di Kalimantan Timur selalu menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2019, umur harapan hidup saat lahir di Kalimantan Timur sudah mencapai 74,22 tahun. Hal ini berarti harapan hidup bayi yang baru lahir dapat bertahan hidup hingga usia 74,22 tahun.

Pada tahun 2010, umur harapan hidup saat lahir di Kalimantan Timur 72,89 dan di tahun 2011 meningkat sekitar 0,29 persen menjadi 73,10 tahun (2011). Tahun 2012 UHH daerah ini naik menjadi 73,32 tahun atau meningkat sekitar 0,30 persen dari tahun 2011. Berikut pada tahun 2013 naik lagi menjadi 73,52 tahun (meningkat sekitar 0,27 persen) dan tahun 2014 mengalami peningkatan sekitar 0,14 persen menjadi 73,62 tahun. Selanjutnya pada tiga tahun berikut peningkatannya di bawah 0,05 persen per tahun dan pada 2018, UHH naik menjadi 73,96 tahun (meningkat sekitar 0,35 persen). Umur harapan hidup saat lahir di Kalimantan Timur tahun 2019 telah mencapai lebih 74 tahun, yaitu naik menjadi 74,22 tahun (meningkat sekitar 0,35 persen). Dengan demikian dalam sembilan tahun terakhir, pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2018 dan 2019.



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur

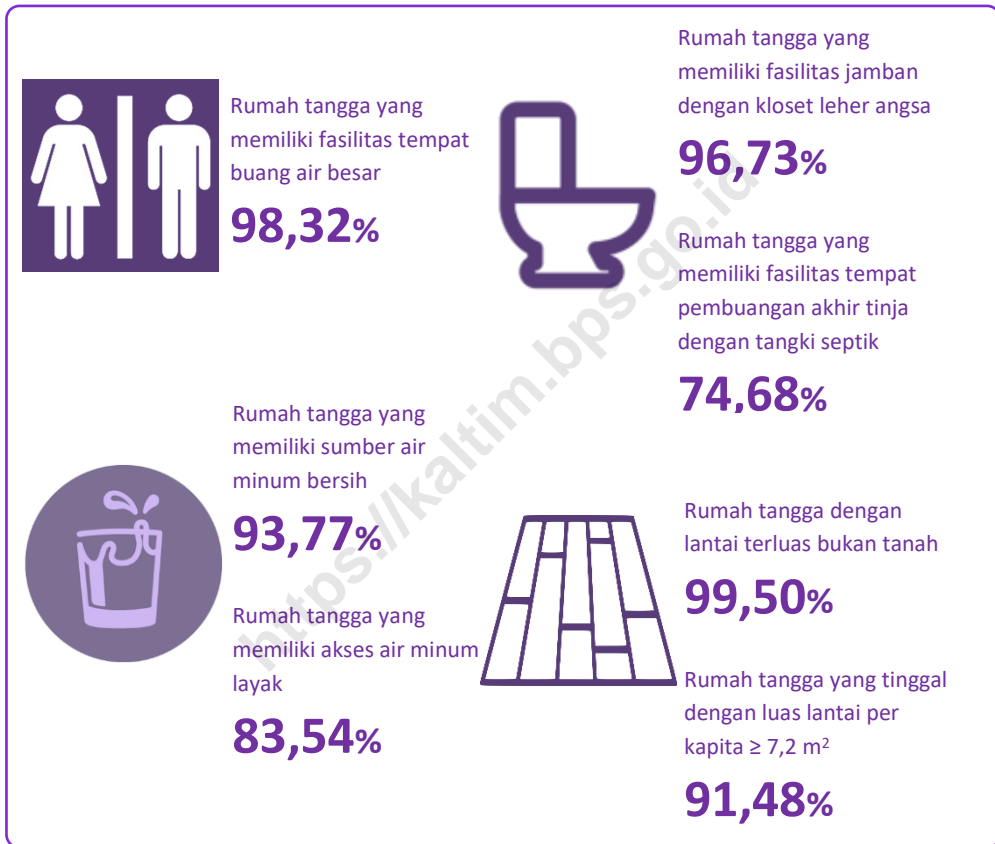
Gambar 3.2 Umur Harapan Hidup Kalimantan Timur per Kabupaten/Kota, 2019

Dari sepuluh kabupaten/kota se-Kalimantan Timur di tahun 2019, Kota Balikpapan memiliki UHH tertinggi yaitu 74,41 tahun, sekaligus lebih tinggi daripada UHH Provinsi Kalimantan Timur yang sebesar 74,22 tahun. Adapun kedua kota lainnya, yaitu Kota Bontang dan Kota Samarinda sama-sama memiliki UHH di atas 74 tahun, yaitu masing-masing 74,18 tahun dan 74,17 tahun. Sementara itu, 7 kabupaten lainnya memiliki UHH di kisaran 71 sampai 73 tahun dengan UHH terendah berada di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) sebesar 71,30 tahun.



Meningkatkan Kondisi Lingkungan yang Sehat

Lingkungan merupakan salah satu faktor yang memiliki peran besar bagi kualitas kesehatan masyarakat. Beberapa indikator lingkungan dapat digunakan untuk melihat derajat kesehatan masyarakat di suatu wilayah, antara lain: kepemilikan tempat buang air besar, kondisi sanitasi, akses terhadap air minum layak, luas dan jenis lantai yang terluas.



Sumber: Susenas Maret 2019, Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur

Gambar 3.3 Indikator Lingkungan, 2019

Pada tahun 2019, sebesar 98,32 persen rumah tangga di Kalimantan Timur telah memiliki fasilitas tempat buang air besar (baik sendiri maupun bersama) atau masih terdapat 1,68 persen rumah tangga yang belum memiliki fasilitas buang air besar. Selain menimbulkan dampak pada pencemaran lingkungan, keterbatasan fasilitas ini akan mempermudah penularan beberapa wabah penyakit. Indikator lingkungan berikutnya adalah ketersediaan dan kualitas sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan (dilengkapi dengan kloset leher angsa dan tempat pembuangan tangki septik). Kualitas sanitasi yang buruk dapat menimbulkan beberapa wabah penyakit. Pada tahun 2019, terdapat 96,73 persen rumah tangga telah memiliki jamban yang dilengkapi dengan kloset leher angsa dan sebesar 74,68 persen telah fasilitas tempat pembuangan akhir tinja dengan tangki septik.

Ketersediaan air bersih juga menjadi indikator kesehatan masyarakat, terlebih kualitas air yang digunakan untuk konsumsi. Pada tahun 2019, sebesar 93,77 persen rumah tangga memiliki sumber air minum bersih dan sebesar 83,54 persen rumah tangga telah memiliki akses air minum layak. Sumber air minum bersih yakni sumber air yang terdiri dari air kemasan, air isi ulang, leding, dan sumur bor/pompa, sumur terlindung serta mata air terlindung dengan jarak ke tempat penampungan limbah/kotoran/tinja terdekat ≥ 10 m, sedangkan akses air minum layak yakni sumber air minum berupa leding, air hujan, sumur bor/pompa, sumur terlindung serta mata air terlindung dan sumber air minum kemasan/air isi ulang dimana sumber air cuci/masak/mandi/dll menggunakan leding, sumur bor/pompa, sumur terlindung serta mata air terlindung. Dari informasi tersebut, lebih dari 15 persen rumah tangga di Kalimantan Timur belum memiliki akses terhadap air minum layak.

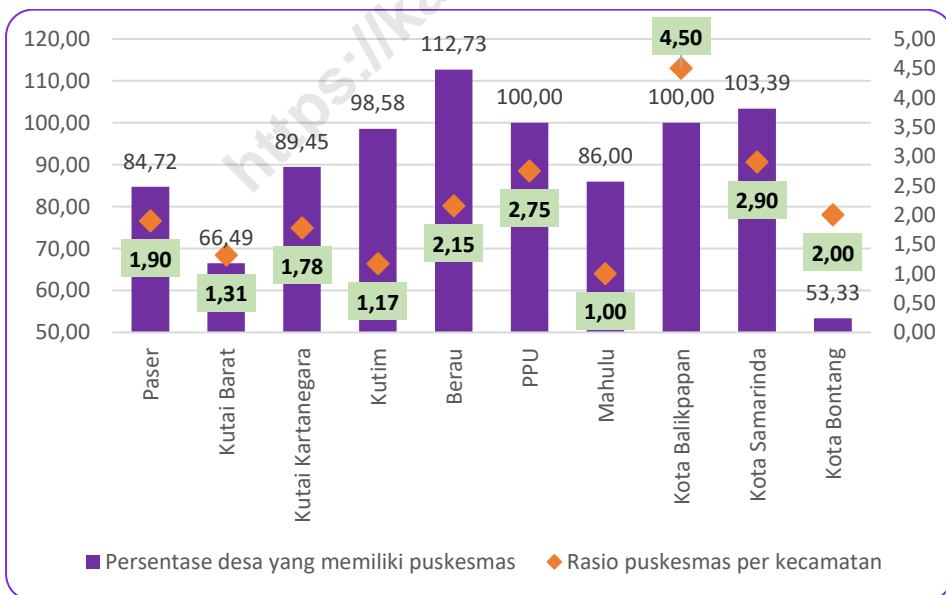
Indikator lain yang dapat menunjang tingkat kesehatan masyarakat adalah jenis lantai dan luas lantai rumah per kapita. Rumah yang memenuhi syarat kesehatan harus memiliki konstruksi lantai yang rapat dan selalu kering, agar mudah dibersihkan dari kotoran dan debu, juga dapat menghindari kelembaban air tanah yang naik ke lantai. Lantai tanah kurang baik karena dapat berdebu pada saat musim kemarau dan akan basah pada musim hujan. Lantai yang basah dan berdebu merupakan tempat timbulnya kuman penyakit dan menjadi media penularan berbagai jenis penyakit. Pada tahun 2019, masih terdapat 0,50 persen rumah tangga di Kalimantan Timur yang tinggal pada rumah yang dengan lantai terluas berupa tanah. Selain itu, indikator luas lantai



per kapita erat hubungannya dengan tingkat kepadatan hunian atau rata-rata luas ruang untuk setiap anggota rumah tangganya. Luas lantai yang ideal harus memiliki sekurang-kurangnya 7,2 m² untuk tiap anggota rumah tangga. Luas bangunan yang tidak sebanding dengan jumlah penghuni akan menyebabkan kondisi rumah yang padat atau berjubel. Hal ini akan berdampak pada kondisi kesehatan para penghuninya, yakni akan menyebabkan berkurangnya konsumsi oksigen juga mudah terjadi penularan penyakit di antara para penghuni. Di Kalimantan Timur, pada tahun 2019 masih terdapat 8,52 persen rumah tangga tinggal di rumah dengan luas lantai per kapita kurang dari 7,2 m².

Fasilitas Kesehatan Terus Meningkat

Derajat kesehatan masyarakat suatu negara dipengaruhi oleh keberadaan sarana kesehatan. Ketersediaan fasilitas kesehatan akan memudahkan akses masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur, pada tahun 2019 di Kalimantan Timur terdapat 43 Rumah Sakit Umum yang telah tersebar di seluruh kabupaten/kota di Kalimantan Timur, 2 Rumah Sakit Khusus di Kota Balikpapan dan Kota Samarinda, dan 8 Rumah Sakit Bersalin/Rumah Bersalin.

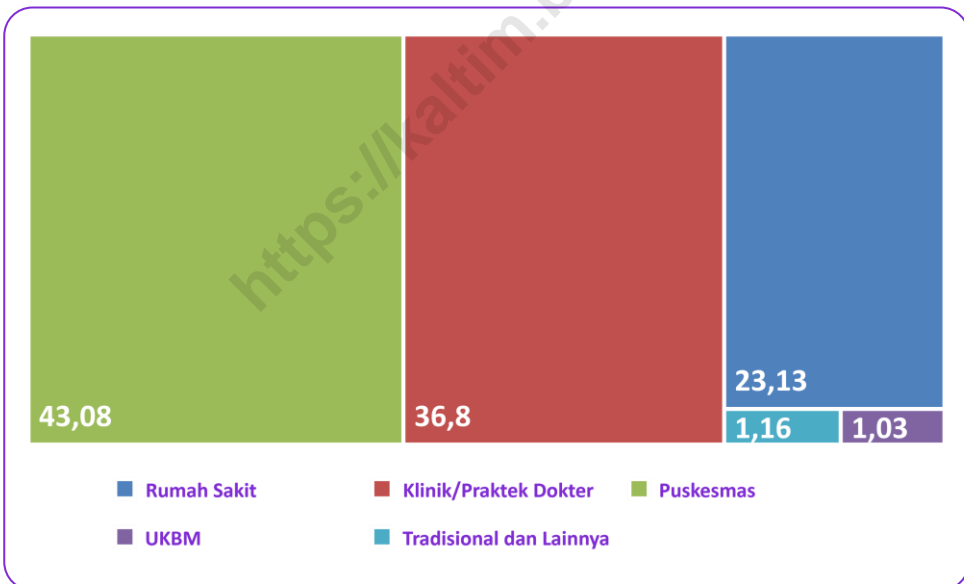


Sumber: Potensi Desa 2018, Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur

Gambar 3.4 Persentase Desa yang memiliki Puskesmas dan Rasio Puskesmas per Kecamatan di Kalimantan Timur, 2018

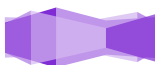
Pembangunan kesehatan suatu negara dapat dimulai dari peningkatan layanan kesehatan di unit wilayah kecil dalam masyarakat. Pada level kecamatan, hal itu menjadi tugas dan tanggung jawab dari puskesmas. Menurut data Potensi Desa (Podes) tahun 2018, persentase desa di Kalimantan Timur yang memiliki puskesmas mencapai 19,17 persen, sedangkan jika ditambah dengan puskesmas pembantu rasionya menjadi 89,21 persen. Kabupaten Kutai Barat memiliki persentase desa yang memiliki puskesmas (termasuk puskesmas pembantu) yang cukup rendah, yakni sebesar 66,49 persen.

Kementrian Kesehatan menyebutkan rasio ideal puskesmas per kecamatan adalah 1. Data Potensi Desa menyebutkan bahwa rasio puskesmas per kecamatan di Kalimantan Timur sebesar 1,93. Rasio puskesmas per kecamatan di seluruh kabupaten/kota sudah berada di atas 1. Hal ini berarti komitmen dalam penyediaan fasilitas kesehatan yang dapat menjangkau masyarakat sudah mencapai target.



Sumber: Susenas Maret 2019, Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur

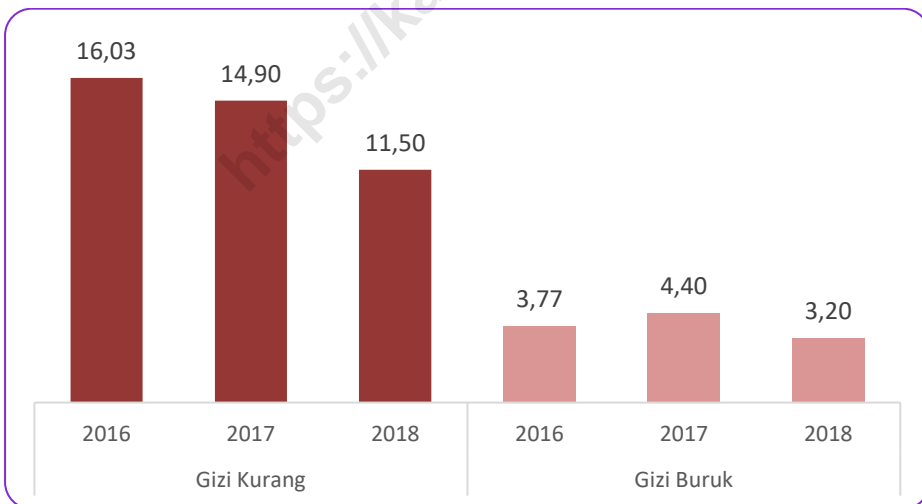
Gambar 3.5 Persentase Penduduk yang Berobat Jalan menurut Tempat Berobat di Kalimantan Timur, 2019



Pemanfaatan fasilitas kesehatan yang disediakan, baik oleh pemerintah maupun swasta diharapkan agar masalah kesehatan yang dihadapi oleh masyarakat dapat segera ditangani. Dengan demikian diharapkan masyarakat yang sehat dan produktif dapat lebih mudah diwujudkan. Tempat rujukan masyarakat untuk berobat jalan dapat menggambarkan akses penduduk untuk memanfaatkan fasilitas kesehatan. Pada tahun 2019, penduduk Kalimantan Timur sudah memanfaatkan berbagai fasilitas kesehatan modern, seperti rumah sakit, praktek dokter/tenaga kesehatan, puskesmas, dan sebagainya. Masih terdapat 1,16 persen masyarakat di Kalimantan Timur yang berobat jalan di praktek pengobatan tradisional dan lainnya.

Gizi Balita Harus terus ditingkatkan

Kualitas sumber daya manusia sangat dipengaruhi oleh gizi yang didapatkan. Gizi yang seimbang dapat menunjang proses tumbuh kembang anak dan akan berdampak pada derajat kesehatan masyarakat. Rendahnya kualitas gizi yang diterima dapat menyebabkan berbagai permasalahan yang saling terkait, seperti kesehatan buruk, kualitas SDM yang rendah, hingga daya saing di pasar tenaga kerja yang kurang memadai.

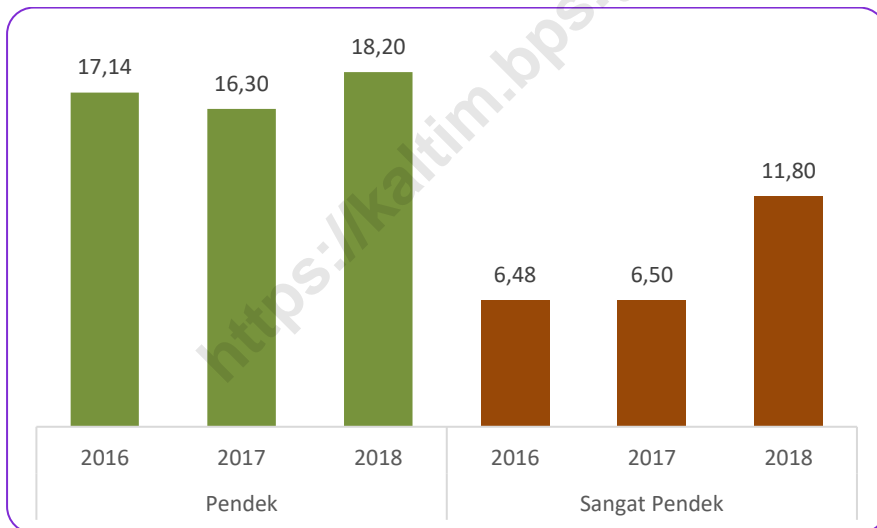


Sumber: Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2019, Badan Pusat Statistik

Gambar 3.6 Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita, 2016-2018

Angka prevalensi kekurangan gizi (*underweight*) pada anak balita di Kalimantan Timur selama periode 2016-2018 cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2019, angka prevalensi kekurangan gizi di Kalimantan Timur tercatat sebesar 14,70 persen, menurun jika dibandingkan dua tahun sebelumnya.

Pemerintah harus memastikan bahwa setiap warga negara memiliki kesempatan dan akses yang sama dalam memperoleh makanan yang berkualitas dengan berbagai upaya seperti menggandakan produktivitas pertanian, menjamin pertanian pangan yang berkelanjutan, meningkatkan kapasitas produksi pertanian, dan sebagainya. Upaya tersebut diharapkan agar masyarakat dapat memperoleh ketahanan pangan dan gizi yang baik dan berkelanjutan, serta meningkatkan taraf hidup masyarakat baik di bidang perekonomian, kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya.



Sumber: Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2019, Badan Pusat Statistik

Gambar 3.7 Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada Anak di Bawah Dua Tahun/Baduta, 2016-2018

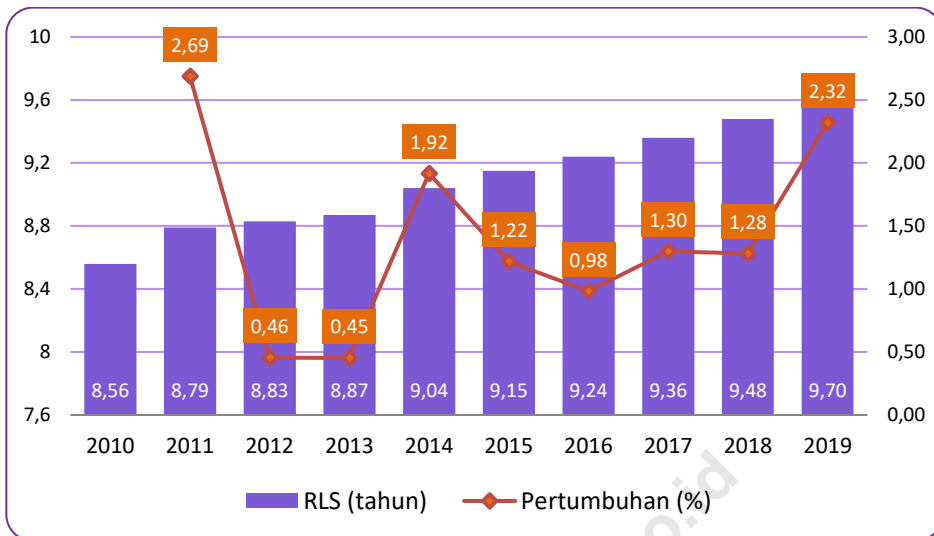


Hasil dari pemantauan gizi terlihat bahwa persentase *stunting* pada baduta selama kurun waktu 3 tahun di Kalimantan Timur cenderung mengalami peningkatan. Persentase baduta yang pendek pada tahun 2018 sebesar 18,20 persen, sementara untuk baduta yang sangat pendek mengalami kenaikan pada tahun 2018 menjadi sebesar 11,80 persen. Oleh karena itu diperlukan upaya yang lebih besar untuk membantu dalam mendiagnosa kondisi kesehatan sejak anak berusia di bawah dua tahun serta memberikan pengetahuan mengenai pentingnya kecukupan gizi bagi anak. Hal tersebut sangat diperlukan untuk menghindari terjadinya *stunting* yang tidak hanya berdampak pada fisik, melainkan juga mental, dan emosial khususnya pada perkembangan kecerdasan dalam berpikir.

Pendidikan untuk Semua

Setelah melihat dimensi pertama pembentuk IPM yaitu umur panjang dan hidup sehat, berikut akan dicermati tentang dimensi pengetahuan yang diukur melalui tingkat pendidikan. Definisi umum pendidikan dapat diartikan sebagai suatu metode untuk mengembangkan keterampilan, kebiasaan dan sikap-sikap yang diharapkan dapat membuat seseorang menjadi lebih baik. Pendidikan bisa dijadikan sebagai suatu langkah untuk mendapatkan kehidupan yang layak dan keluar dari segala bentuk kebodohan dan kemiskinan. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, diharapkan akan semakin cerdas, semakin kreatif dan dapat menikmati kehidupan yang lebih baik. Dalam hal ini, indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat Pendidikan adalah Rata-rata Lama Sekolah (RLS/*Mean Years of Schooling*) dan Harapan Lama Sekolah (HLS/*Expected Years of Schooling*).

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Sedangkan Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Harapan lama sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas.



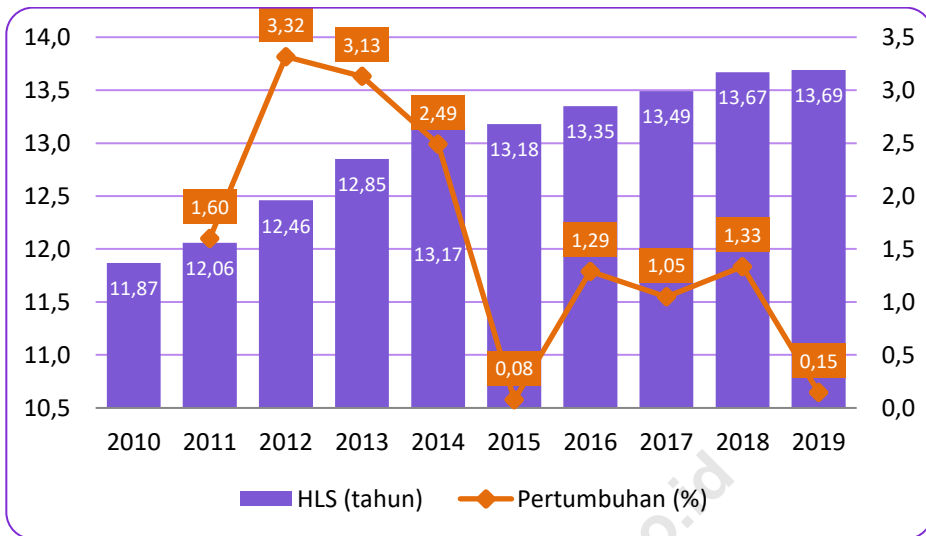
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur

Gambar 3.8 Rata-rata Lama Sekolah di Provinsi Kalimantan Timur, 2010-2019

Secara umum rata-rata lama sekolah penduduk di Provinsi Kalimantan Timur, menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2019, rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas di Provinsi Kalimantan Timur telah mencapai angka 9,78 tahun atau setara dengan tamat kelas IX (kelas III SMP). Selama sembilan tahun terakhir, pertumbuhan tertinggi rata-rata lama sekolah terjadi pada tahun 2011 sebesar 2,69 persen yaitu dari 8,56 tahun (2010) menjadi 8,79 tahun (2011). Pertumbuhan tertinggi berikutnya terjadi pada tahun 2019 tercatat sekitar 2,32 persen yaitu dari 9,48 tahun pada tahun 2018 menjadi 9,70 tahun pada tahun 2019.

Indikator yang mewakili dimensi pendidikan berikutnya adalah harapan lama sekolah. Seperti halnya dengan keadaan rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah penduduk berusia tujuh tahun ke atas di Provinsi Kalimantan Timur juga tampak mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2010, harapan lama sekolah penduduk Kalimantan Timur tercatat sekitar 11,87 tahun yang berarti bahwa anak usia 7 tahun ke atas yang memasuki dunia pendidikan diharapkan dapat bersekolah selama 11,87 tahun atau diperkirakan dapat mencapai kelas XI (kelas II SMA).



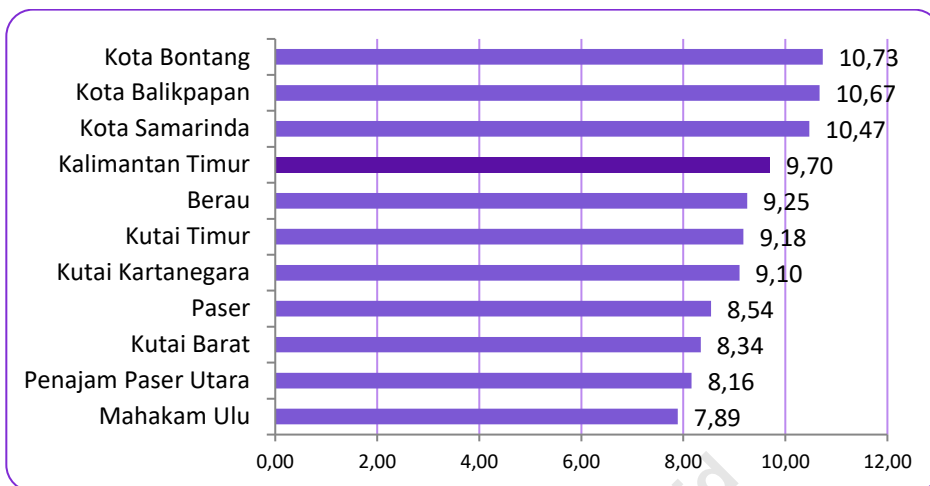


Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur

Gambar 3.9 Harapan Lama Sekolah di Provinsi Kalimantan Timur, 2010-2019

Seiring berjalannya waktu, harapan lama sekolah penduduk Kalimantan Timur semakin meningkat. Seperti yang tercatat pada tahun 2019, harapan lama sekolah penduduk usia 7 tahun ke atas di Provinsi Kalimantan Timur telah mencapai angka 13,69 tahun. Dengan kata lain, penduduk usia 7 tahun ke atas yang memasuki jenjang persekolahan diharapkan dapat bersekolah selama 13,69 tahun atau dapat menamatkan pendidikan mereka hingga lulus SMA bahkan mencapai jenjang Pendidikan tinggi Diploma I.

Selama kurun waktu sembilan tahun, harapan lama sekolah penduduk Kalimantan Timur terus menunjukkan peningkatan. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2012 sebesar 3,32 persen yaitu dari 12,06 tahun pada tahun 2011 menjadi 12,46 tahun di tahun 2012. Pada tahun 2019 sendiri, jika dibandingkan dengan tahun 2018 pertumbuhan harapan lama sekolah hanya tumbuh sekitar 0,15 persen.

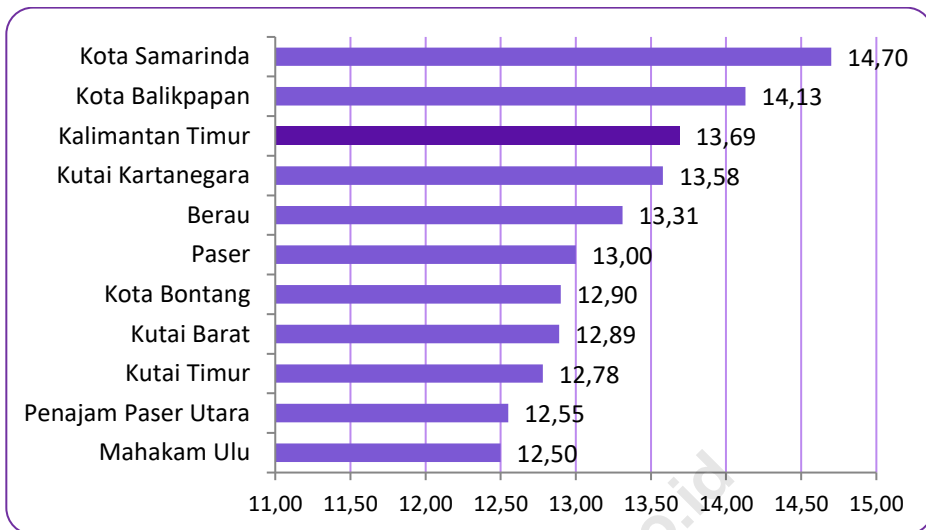


Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur

Gambar 3.10 Rata-rata Lama Sekolah per Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur, 2019

Pada tingkat Kabupaten/Kota kondisi dimensi pendidikan tidak jauh berbeda dengan kondisi pendidikan di Provinsi Kalimantan Timur. Pada tahun 2019, dari 10 kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur terlihat penduduk Kota Bontang tercatat sebagai kota dengan capaian rata-rata lama sekolah (RLS) penduduk usia 25 tahun ke atas tertinggi. Pada tahun 2019, rata-rata lama sekolah penduduk 25 tahun ke atas di Kota Bontang mencapai 10,73 tahun atau setara dengan kelas X (kelas I SMA). Kedua kota lainnya juga memiliki angka RLS di atas 10 tahun, masing-masing 10,67 untuk Kota Balikpapan dan 10,47 untuk Kota Samarinda. Angka RLS ketiga kota tersebut sekaligus juga lebih tinggi dibandingkan angka RLS di Provinsi Kalimantan Timur yaitu 9,70 tahun (setara lulus SMP), sedangkan angka RLS 7 kabupaten lainnya berada di bawah RLS Provinsi Kalimantan Timur. Tiga kabupaten yang memiliki RLS di atas 9 tahun yaitu Kabupaten Berau (9,25 tahun), Kutai Timur (9,18 tahun) dan Kutai Kartanegara (9,10). Tiga kabupaten lainnya memiliki angka RLS di kisaran 8 tahun atau setara dengan kelas 2 SMP yaitu kabupaten Paser (8,54 tahun), Kutai Barat (8,34 tahun) dan PPU (8,16 tahun). Sementara itu kabupaten Mahulu yang merupakan kabupaten paling bungsu di Provinsi Kalimantan Timur memiliki RLS di kisaran 7 tahun atau tepatnya 7,89 tahun yang setara dengan kelas 1 SMP (kelas VII).





Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur

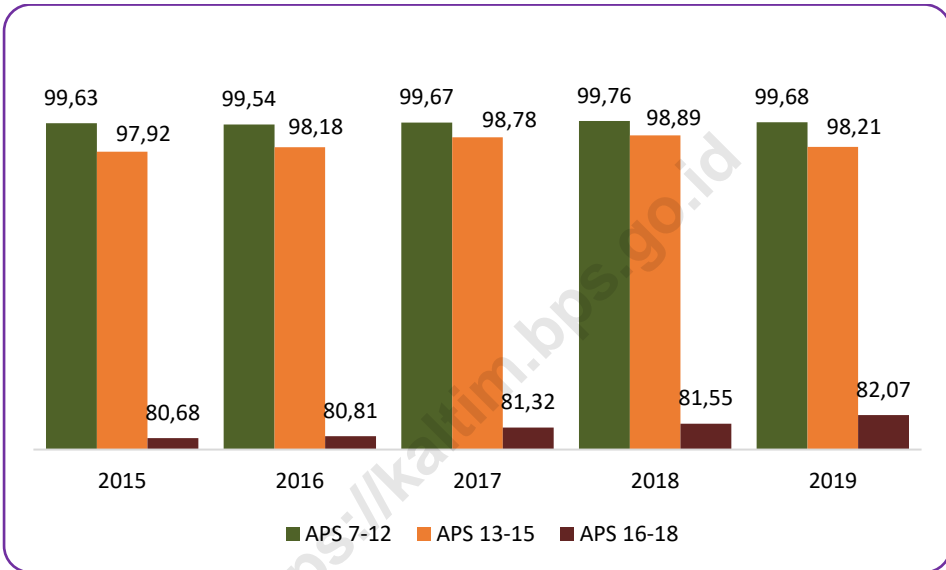
Gambar 3.11 Harapan Lama Sekolah per Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur, 2019

Dari sepuluh kabupaten/kota di Kalimantan Timur, ada dua kota yang memiliki capaian harapan lama sekolah lebih tinggi dari angka harapan lama sekolah Provinsi Kalimantan Timur (13,69 tahun). Kedua kota tersebut adalah Kota Samarinda (14,70 tahun) dan Kota Balikpapan (14,13 tahun). Adapun delapan kabupaten/kota yang lain, capaian harapan lama sekolah di tahun 2019 berada di bawah capaian harapan lama sekolah provinsi. Secara keseluruhan, angka harapan lama sekolah di provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2019 berada di atas 12 tahun, yang berarti bahwa anak usia 7 tahun ke atas yang memasuki dunia pendidikan diharapkan dapat bersekolah lebih dari 12 tahun atau diperkirakan dapat menempuh pendidikan hingga lulus SMA.

Partisipasi Sekolah Terus Meningkat

Pembangunan manusia tidak dapat dilepaskan dari peningkatan kualitas pendidikan. Peningkatan kualitas pendidikan juga akan mendorong perbaikan di bidang lain seperti tingkat kesehatan yang lebih baik dan kesejahteraan secara ekonomi. Pendidikan merupakan hak setiap warga negara. Kondisi pembangunan di bidang pendidikan dapat diketahui melalui beberapa indikator pendidikan.

Untuk mengetahui proporsi penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan, maka digunakan indikator angka partisipasi sekolah (APS). APS adalah proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut. APS yang tinggi menunjukkan tingginya partisipasi sekolah dari penduduk pada umur tertentu serta menunjukkan terbukanya peluang yang lebih besar dalam mengakses pendidikan secara umum.



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur

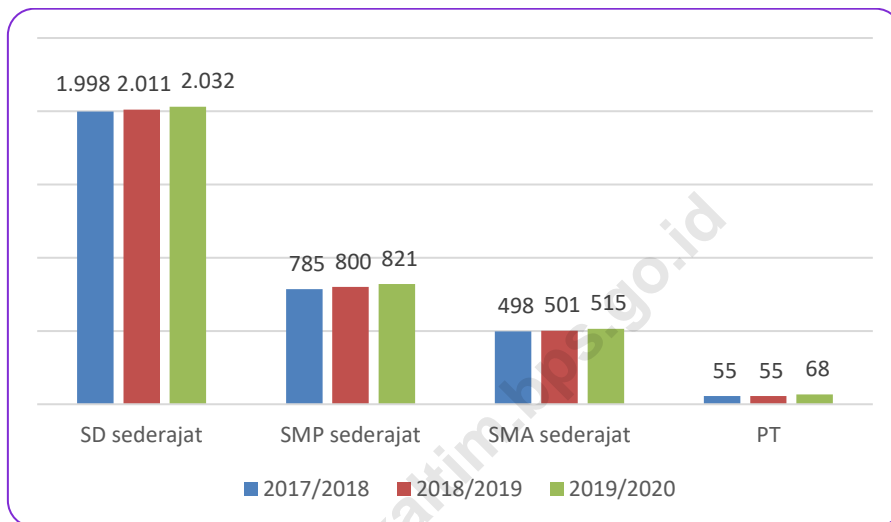
Gambar 3.12 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kalimantan Timur, 2015-2019

Terlihat bahwa APS di Kalimantan Timur untuk masing-masing kelompok umur terlihat terjadi peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2019, untuk kelompok umur 7-12 tahun (tingkat SD) menampilkan angka 99,68 persen. Angka tersebut mendekati 100 persen, artinya hampir semua anak berumur 7-12 tahun sedang bersekolah. APS ini cenderung menurun seiring bertambahnya kelompok umur. Pada kelompok umur 13-15 tahun, sebesar 98,21 persen penduduk sedang bersekolah. Sementara itu pada kelompok umur 16-18 tahun masih terdapat 17,93 persen penduduk yang tidak sedang bersekolah.



Fasilitas pendidikan terus meningkat

Ketersediaan fasilitas pendidikan baik sarana maupun prasarana akan sangat menunjang dalam meningkatkan mutu pendidikan. Tersedianya sarana yang berkualitas dapat menunjang kualitas belajar siswa. Salah satu sarana yang diperlukan yakni sekolah.

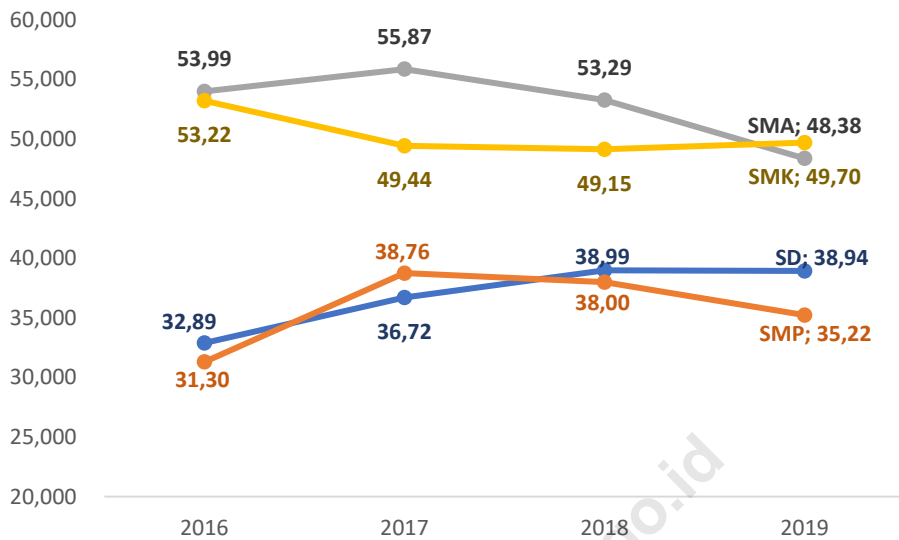


Sumber: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, dan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi

Gambar 3.13 Jumlah Sekolah dan Perguruan Tinggi di Kalimantan Timur, 2017/2018-2019/2020

Jumlah sekolah dari jenjang SD sampai dengan SMA terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2019 di Kalimantan Timur terdapat 2.032 sekolah SD/MI/ sederajat, 821 sekolah SMP/MTs/ sederajat, 515 sekolah SMA/SMK/MA/ sederajat serta 68 Perguruan Tinggi baik swasta maupun negeri.

Selain jumlah sekolah, sarana lain yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas belajar para siswa adalah ruang kelas yang baik. Namun sayangnya, dari data Kemendikbud masih banyak ditemui sekolah dengan kualitas ruang kelas yang kurang memadai.



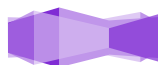
Sumber: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

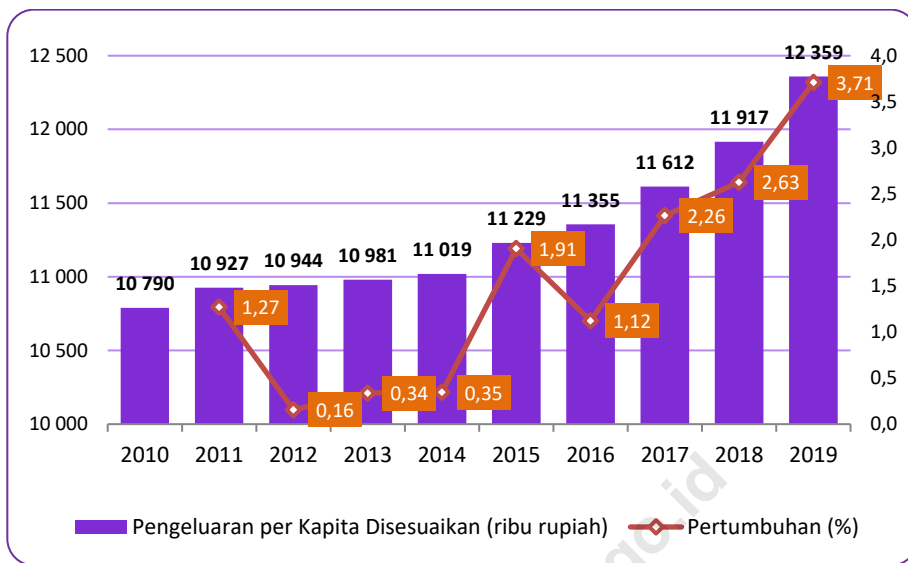
Gambar 3.14 Persentase Ruang Kelas Baik di Kalimantan Timur, 2016-2019

Data yang diperoleh menunjukkan persentase ruang kelas baik masih kurang dari 50 persen pada jenjang SD dan SMP, dan berkisar 50 persen pada jenjang SMA dan SMK. Kedepannya dengan alokasi dana untuk pendidikan termasuk untuk pembangunan dan renovasi sarana prasarana sekolah diharapkan kualitas pendidikan di Indonesia dapat lebih baik.

Peningkatan Standar Hidup Layak

Kemajuan pembangunan ekonomi di suatu daerah akan berdampak pada tingkat kesejahteraan yang dinikmati masyarakat atau penduduknya. Semakin baik kinerja pembangunan ekonomi di suatu wilayah diharapkan dapat meningkatkan pengeluaran atau pendapatan penduduknya. Dimensi standar hidup layak dicerminkan oleh indikator pengeluaran per kapita yang disesuaikan.

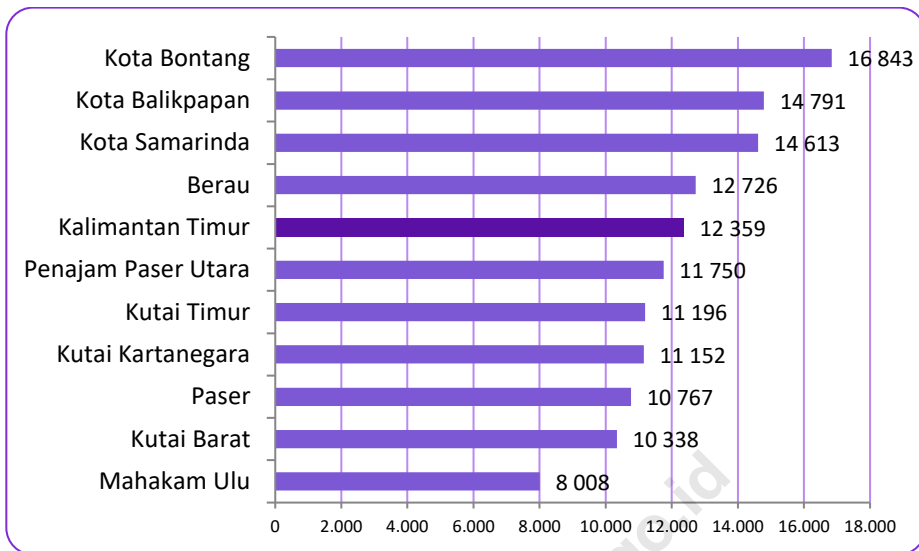




Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur

Gambar 3.15 Rata-rata Pengeluaran Per Kapita Per Tahun Masyarakat Kalimantan Timur , 2010-2019 (ribu rupiah)

Pengeluaran per kapita yang disesuaikan di Kalimantan Timur terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama kurun waktu 2010-2019, pengeluaran per kapita Kalimantan Timur mengalami peningkatan sekitar 1,6 juta rupiah. Jika pada tahun 2010 pengeluaran per kapita penduduk Kalimantan Timur sekitar 10,79 juta rupiah per tahun, maka di tahun 2019 telah mencapai 12,36 juta rupiah per tahun atau sekitar 1,03 juta rupiah per bulan. Selama kurun waktu tersebut, pengeluaran per kapita per tahun penduduk Kalimantan Timur terus tumbuh pada setiap tahunnya. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2019 sebesar 3,71 persen atau bertambah sekitar 442 ribu rupiah, yaitu dari 11,92 juta rupiah pada tahun 2018 menjadi 12,36 juta rupiah pada tahun 2019.



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur

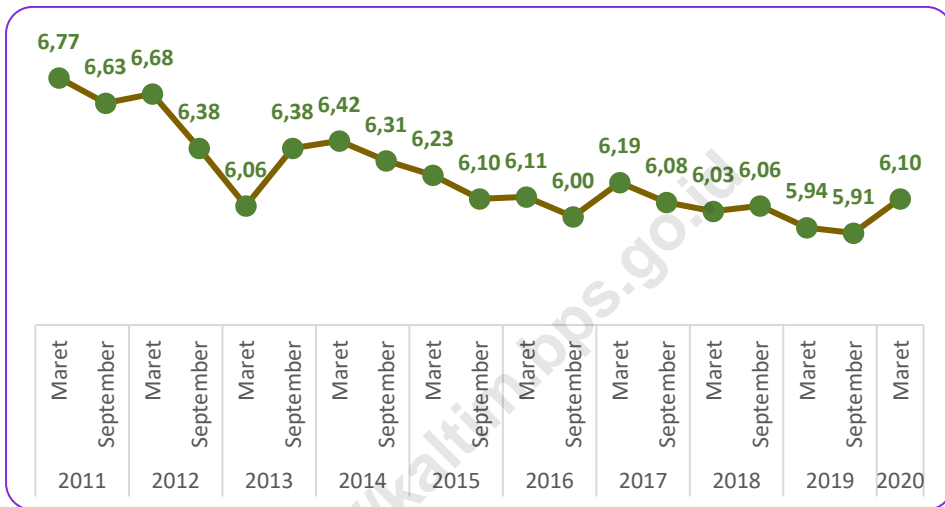
Gambar 3.16 Rata-rata Pengeluaran Masyarakat Per Kapita Per Tahun per Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur, 2019 (ribu rupiah)

Pada tahun 2019, terdapat tiga kota dan satu kabupaten yang memiliki pengeluaran per kapita yang lebih besar daripada angka pengeluaran per kapita Provinsi Kalimantan Timur (12,36 juta rupiah). Keempatnya antara lain Kota Bontang (16,84 juta rupiah), Kota Balikpapan (14,79 juta rupiah), Kota Samarinda (14,61 juta rupiah) dan Kabupaten Berau (12,73 juta rupiah). Kabupaten PPU, Kutai Timur dan Kutai Kartanegara memiliki pengeluaran per kapita di kisaran 11 juta rupiah. Dua kabupaten lainnya yaitu Paser dan Kutai Barat berada di kisaran 10 juta rupiah. Sementara itu, hanya Kabupaten Mahulu yang pengeluaran per kapitanya masih berada di bawah 10 juta rupiah, yakni sebesar 8,01 juta rupiah.



Pengurangan Kemiskinan Terus Ditingkatkan

Salah satu penghambat laju pembangunan manusia adalah masalah kemiskinan. Kemiskinan seringkali menjadi penghalang bagi penduduk dalam mengakses kesehatan dan pendidikan. Pemberantasan kemiskinan akan berdampak pada peningkatan kualitas pembangunan manusia, terutama dari sisi ekonomi.



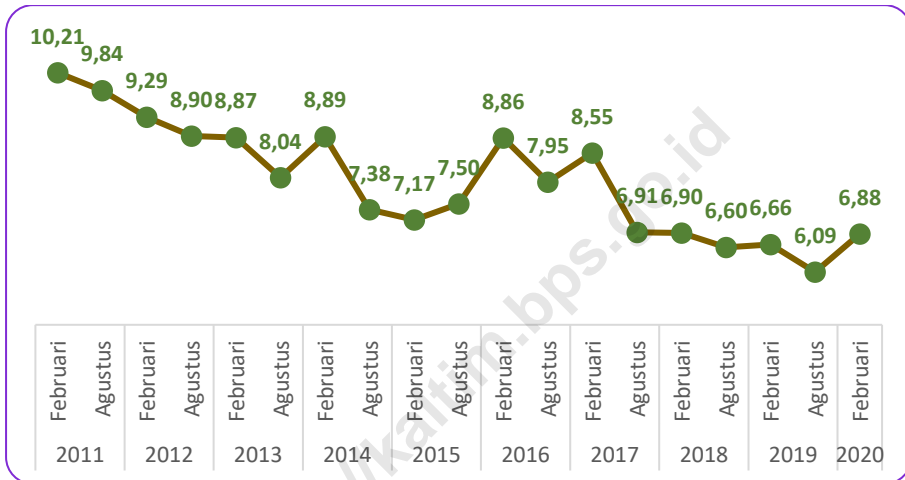
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur

Gambar 3.17 Tren Kemiskinan di Kalimantan Timur, 2011-2019

Penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan cenderung berkurang. Hal ini dapat dilihat dari penurunan jumlah dan persentase penduduk miskin selama periode tahun 2011-2019. Penghitungan angka kemiskinan berdasarkan data Susenas yang dilaksanakan pada bulan Maret dan September, persentase penduduk miskin di Kalimantan Timur sejak 2011 berada di bawah 7 persen dan selalu berada di bawah rata-rata nasional. Pada Maret 2020, terjadi peningkatan persentase penduduk miskin menjadi sebesar 6,10 persen jika dibandingkan tahun 2018-2019.

Penurunan Pengangguran Harus Terus Ditingkatkan

Permasalahan yang cukup pelik dalam dunia ekonomi dan tenaga kerja adalah pengangguran. Tingkat pengangguran yang tinggi dapat menyebabkan menurunnya tingkat kemakmuran masyarakat. Pada tahun 2020, TPT Kalimantan Timur berada di angka 6,88 persen. Berdasarkan data Sakernas Februari 2020, setidaknya terdapat 137 ribu pengangguran di Kalimantan Timur.

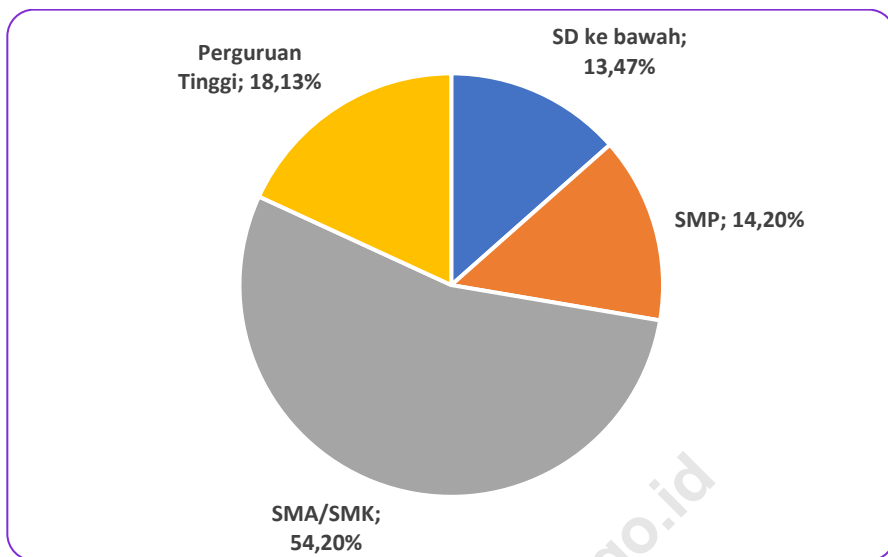


Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur

Gambar 3.18 Tren Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kalimantan Timur, 2011-2019

Dilihat dari sisi pendidikan, lebih dari separuh pengangguran di Kalimantan Timur berpendidikan menengah atas (SMA dan SMK). Pengangguran pada angkatan kerja berpendidikan tinggi juga mengambil porsi yang cukup besar. Bahkan pengangguran dengan pendidikan tinggi lebih besar dibanding yang berpendidikan rendah (SMP ke bawah).





Gambar 3.19 Pengangguran Terbuka menurut Pendidikan di Kalimantan Timur, Agustus 2019 (Persen)

Tingginya pengangguran dengan pendidikan tinggi merupakan suatu indikasi adanya ketidakcocokan kompetensi yang dihasilkan oleh sistem pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja. Hal ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah untuk melakukan perbaikan pada sistem pendidikan, khususnya pada tingkat perguruan tinggi.

BAB IV

DISPARITAS PEMBANGUNAN MANUSIA



BAB IV Disparitas Pembangunan Manusia

Disparitas pembangunan manusia muncul antarindividu, antargender, antardimensi, dan antarwilayah. Disparitas ini tentu harus ditekan dan diupayakan agar hilang. Idealnya, setiap individu mempunyai kesempatan dan pilihan yang sama. Begitu pula dengan kesempatan dan pilihan yang dimiliki oleh laki-laki dan perempuan. Tentu saja hal tersebut harus merata di semua wilayah, di mana pun mereka berada dan pada dimensi apa pun.

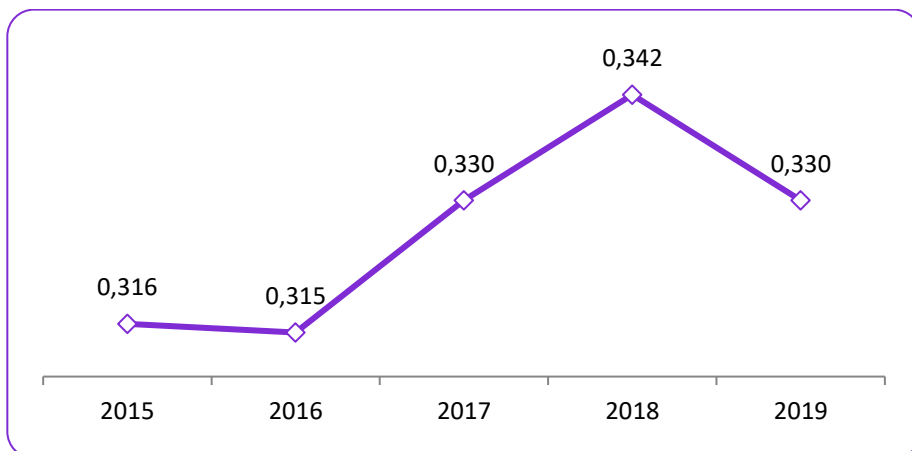
Disparitas Antarindividu

Fokus dan perhatian utama dalam paradigma pembangunan manusia adalah manusia karena merupakan tujuan akhir pembangunan. Setiap individu harus dapat dipastikan agar memiliki kesempatan yang sama dalam memperluas pilihan-pilihannya. Konsep ini akan menjamin bahwa semua individu mempunyai capaian pembangunan manusia yang sama, adil, dan merata.

Kenyataannya, hal tersebut tidaklah mudah dicapai. Disparitas pembangunan manusia yang terjadi antar individu tidak dapat dihindari. Kondisi ketimpangan secara tidak langsung menunjukkan bahwa tidak semua orang memiliki peluang yang sama dalam mengakses layanan masyarakat terutama pelayanan kesehatan dan pendidikan yang merupakan modal dasar untuk mendapatkan penghasilan dan penghidupan yang layak. Disparitas yang terjadi antarindividu pada hakikatnya dapat mengaburkan fakta meningkatnya capaian pembangunan manusia.

Ketimpangan antarindividu tercermin dalam angka *Gini ratio*. *Gini ratio* mengukur ketimpangan pengeluaran antar penduduk. Semakin mendekati angka 1, maka semakin tinggi ketimpangan di wilayah tersebut. Sebaliknya, apabila *Gini ratio* semakin menjauhi angka 1 dan mendekati angka 0 (nol), maka semakin baik pemerataan di wilayah tersebut. *Gini ratio* di Kalimantan Timur tercatat sebesar 0,328 pada Maret 2020.





Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur, SUSENAS Maret

Gambar 4.1 Tingkat Ketimpangan (Gini Ratio) di Kalimantan Timur, 2015-2019

Hal ini mengindikasikan bahwa disparitas antarindividu dari sisi ekonomi masih terjadi. Tren *Gini ratio* di Provinsi Kalimantan Timur dari tahun 2015-2019 mengalami fluktuasi dengan ketimpangan tertinggi terjadi pada tahun 2018 (0,342) dan turun pada tahun 2019 (0,330).

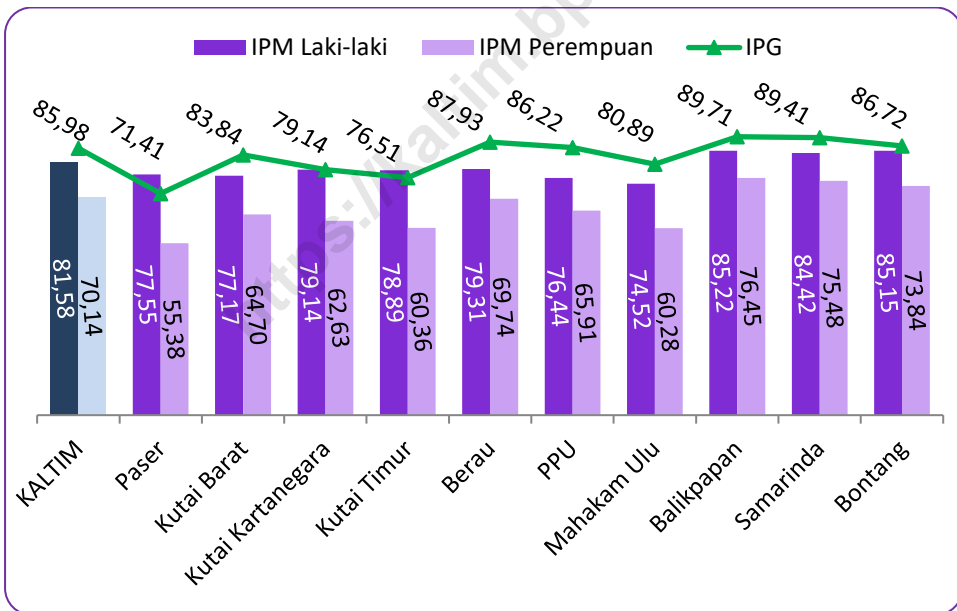
Disparitas Gender

Istilah gender berbeda dengan karakteristik laki-laki dan perempuan secara biologis. Konsep gender mengacu pada perbedaan laki-laki dan perempuan dalam peran, perilaku, kegiatan, serta atribut yang dikonstruksikan secara sosial. Perbedaan ini tidak menjadi masalah bila disertai dengan keadilan, sebab ketidakadilan yang terjadi dapat mengakibatkan kerugian bagi laki-laki maupun perempuan. Oleh karena itu, kesetaraan gender merupakan hak yang semestinya didapatkan agar laki-laki dan perempuan memperoleh kesempatan yang sama untuk berperan dan ikut berpartisipasi dalam setiap aspek kehidupan.

Indikator yang dapat digunakan untuk melihat capaian pembangunan manusia dengan mempertimbangkan aspek gender yakni Indeks Pembangunan Gender (IPG). IPG dihitung untuk melihat capaian pembangunan manusia yang diraih oleh laki-laki dan perempuan. Nilai IPG yang mendekati 100, menunjukkan disparitas gender di wilayah tersebut. Apabila IPG berada jauh di bawah 100,

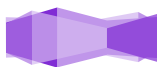
artinya capaian pembangunan manusia yang dicapai laki-laki di wilayah tersebut lebih tinggi daripada perempuan, begitu pula jika sebaliknya.

Di Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2019, pembangunan manusia yang dicapai laki-laki masih lebih tinggi dibanding perempuan. Hal ini tercermin dalam IPG Kalimantan Timur pada tahun 2019 yang mencapai 85,98. Artinya, capaian pembangunan manusia laki-laki lebih tinggi dibanding perempuan. Tercatat bahwa IPM laki-laki mencapai 81,58 sementara IPM perempuan hanya sebesar 70,14. Secara konseptual, capaian ini merefleksikan masih besarnya disparitas gender di Kalimantan Timur. Disparitas gender ini bahkan terjadi di semua kabupaten/kota di Kalimantan Timur. Kabupaten Paser merupakan wilayah dengan disparitas gender tertinggi, dengan IPG yang hanya sebesar 71,41. Sementara itu, Kota Balikpapan merupakan wilayah dengan disparitas gender terendah, dengan IPG sebesar 89,71. Adapun IPG di kabupaten/kota lainnya di Provinsi Kalimantan Timur berkisar di antara 76 sampai 89.



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur

Gambar 4.2 Indeks Pembangunan Gender (IPG) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur, 2019



Dalam kurun tahun 2010-2019, IPM yang dicapai baik oleh laki-laki maupun perempuan di Kalimantan Timur masing-masing terus mengalami kenaikan. Hal ini diikuti juga oleh angka IPG yang semakin mendekati 100, yang mengindikasikan semakin berkurangnya disparitas gender di Provinsi Kalimantan Timur dalam kurun waktu tersebut. Pada tahun 2010, capaian IPM laki-laki sebesar 76,12 dan perempuan hanya sebesar 63,18, menghasilkan angka IPG sebesar 83,00. IPM laki-laki maupun perempuan terus mengalami kenaikan hingga tahun 2019 mencapai 81,58 untuk IPM laki-laki dan 70,14 untuk IPM perempuan, dengan angka IPG sebesar 85,98.

Penyebab masih adanya disparitas gender di Kalimantan Timur yakni aspek ekonomi perempuan yang memang lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki. Rata-rata pendapatan per kapita perempuan di Kalimantan Timur yang diproksi dengan rata-rata pengeluaran per kapita sekitar 6,99 juta rupiah selama setahun. Jumlah ini jauh lebih kecil dibandingkan pengeluaran per kapita laki-laki yang mencapai 18,34 juta rupiah per tahun.

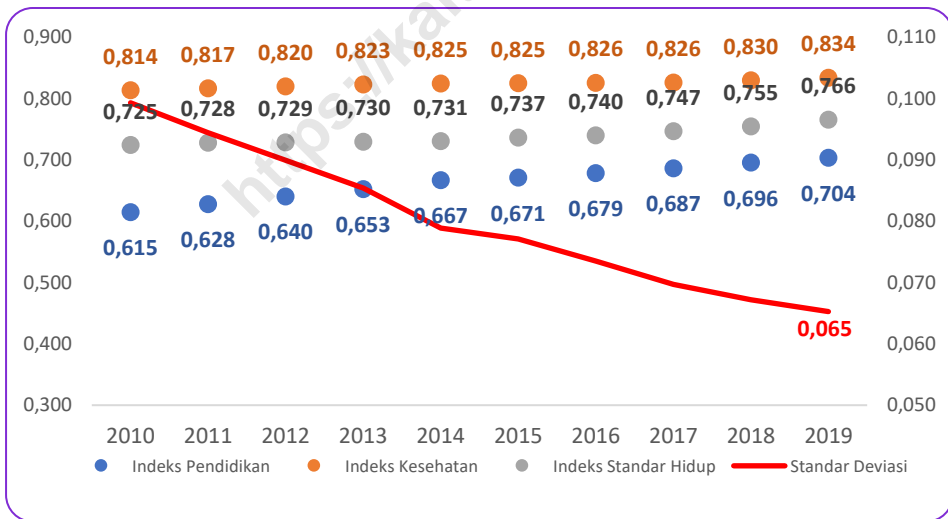
Secara konseptual, disparitas gender memang masih terjadi Provinsi Kalimantan Timur hingga saat ini. Namun, tren kenaikan IPG yang semakin mendekati 100 setiap tahunnya tentu merupakan hal yang sangat baik. Jika tren positif ini terus berlanjut, maka bukan tidak mungkin jika suatu saat nanti disparitas gender di Provinsi Kalimantan Timur akan semakin mengecil.

Disparitas Antardimensi dan Antarwilayah

Kalimantan Timur memang kaya akan sumber daya alamnya. Kekayaan sumber daya alam ini khususnya di bidang pertambangan dan kehutanan menjadikan wilayah ini memiliki potensi yang sangat besar untuk berkembang. Namun, pemanfaatan potensi yang sedemikian besar belum tentu mampu berimbans pada pembangunan manusia secara optimal. Kompleksitas berbagai faktor seperti sumber daya manusia, letak geografis, sejarah, kemajuan teknologi yang digunakan dan tidak meratanya sumber daya alam merupakan hal yang masih menjadi kendala dalam menuju pemerataan pembangunan. Masih banyaknya wilayah Kalimantan Timur yang susah untuk diakses, misalnya saja Kabupaten Mahakam Ulu yang merupakan kabupaten paling terpencil di provinsi ini di mana akses ke wilayah tersebut masih sangat susah sehingga

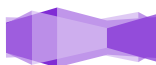
kondisi pembangunan di sana pun masih sangat jauh bila dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Kalimantan Timur, terutama jika dibandingkan dengan kondisi pembangunan di daerah perkotaan. Perbedaan kondisi antar kabupaten/kota yang satu dan yang lainnya dalam berbagai hal tersebut tentunya menimbulkan adanya disparitas antarwilayah maupun antardimensi dari pembangunan manusia.

Dalam konsep yang dibangun dalam paradigma pembangunan manusia mengacu pada asas pemerataan pembangunan dan tentu sangat anti terhadap disparitas pembangunan. Dalam konteks yang membentuk pembangunan manusia, konsep ini mengandung konsekuensi bahwa capaian semua dimensi harus merata. Penghitungan IPM dengan metode baru telah mencoba untuk mengeliminasi efek substitusi antardimensi dengan penggunaan rata-rata geometrik dalam penghitungan IPM. Penggunaan rumus rata-rata geometrik dalam penghitungan IPM menyiratkan bahwa capaian yang rendah pada suatu dimensi tidak dapat ditutupi oleh capaian tinggi dari dimensi lain. Capaian dimensi yang rendah akan menarik dimensi lain menjadi rendah. Hal ini karena rata-rata geometrik cukup sensitif terhadap nilai yang rendah.



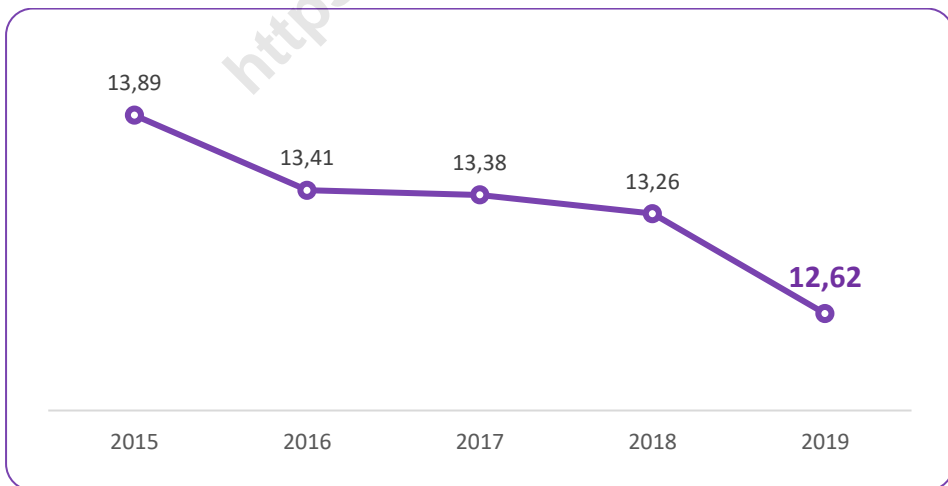
Sumber: Badan Pusat Statistik Kalimantan Timur (diolah)

Gambar 4.3 Perkembangan Indeks dan Standar Deviasi Indeks Pembangunan Manusia di Kalimantan Timur, 2010-2019



Disparitas antardimensi pembangunan manusia masih terjadi di Kalimantan Timur. Selama kurun waktu 2010-2019, perkembangan disparitas antardimensi terus mengalami penurunan. Semakin kecilnya standar deviasi selama periode 2010-2019 menunjukkan bahwa disparitas antardimensi pembangunan manusia mengalami perbaikan. Meskipun demikian, hal itu bukan berarti bahwa permasalahan disparitas antardimensi berakhir. Capaian dimensi yang rendah harus terus didorong agar meningkat sedangkan capaian dimensi yang sudah tinggi harus tetap dipertahankan bahkan ditingkatkan.

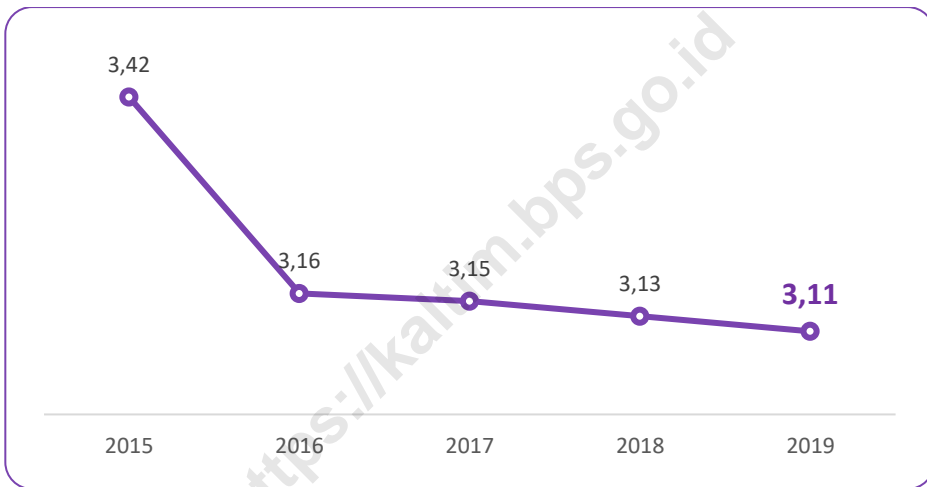
Sampai dengan tahun 2019, disparitas pembangunan antar kabupaten/kota di Kalimantan Timur terlihat dari besaran selisih IPM kabupaten/kota tertinggi (Kota Samarinda, IPM 80,20) dengan yang terendah (Kabupaten Mahulu, IPM 67,58) yang masih berada di atas 10 poin, atau tepatnya 12,62. Angka ini memiliki kecenderungan turun dari tahun ke tahun, yang terlihat pada gambar 4.4, di mana pada tahun 2015 selisih IPM kabupaten/kota tertinggi dan terendah sebesar 13,89 poin dan terus turun setiap tahunnya hingga tersisa 12,62 poin pada tahun 2019. Tentunya penurunan kesenjangan IPM ini cukup menggembirakan. Namun, upaya pemerataan pembangunan di tiap kabupaten/kota di provinsi Kalimantan Timur tentunya masih harus ditingkatkan lagi untuk semakin memperkecil kesenjangan ini.



Sumber: Badan Pusat Statistik Kalimantan Timur (diolah)

Gambar 4.2 Selisih IPM Kabupaten/Kota Tertinggi dengan Terendah di Kalimantan Timur, 2015-2019 (tahun)

Pada tahun 2019, selisih usia harapan hidup (UHH) kabupaten/kota tertinggi (Kota Balikpapan, UHH 74,41 tahun) dan terendah (Kabupaten PPU, UHH 71,30 tahun) di Kalimantan Timur mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya namun tetap berada di kisaran 3 tahun, tepatnya 3,11 tahun. Selisih angka UHH ini menunjukkan bahwa pada tahun 2019, bayi yang lahir dan dibesarkan di Kota Balikpapan memiliki usia harapan hidup lebih lama 3,11 tahun bila dibandingkan dengan bayi yang lahir dan dibesarkan di Kabupaten PPU. Dalam hal ini, upaya-upaya untuk pemerataan pembangunan fasilitas dan layanan kesehatan masyarakat harus terus ditingkatkan agar disparitas kesehatan semakin mengecil.

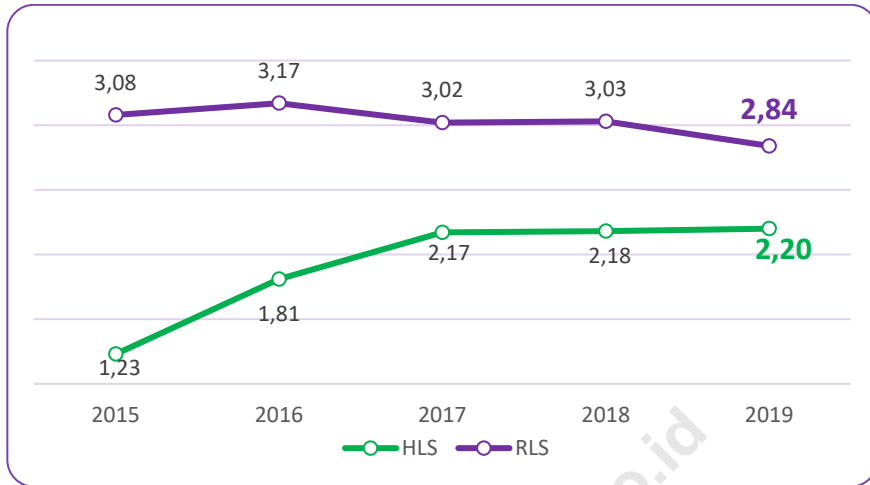


Sumber: Badan Pusat Statistik Kalimantan Timur (diolah)

Gambar 4.3 Selisih Usia Harapan Hidup Kabupaten/Kota Tertinggi dan Terendah di Kalimantan Timur, 2015-2019 (tahun)

Dari sisi dimensi pengetahuan, disparitas pembangunan manusia dapat dilihat melalui dua indikator, yaitu angka Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Pada periode tahun 2015-2019, selisih harapan lama sekolah kabupaten/kota tertinggi dan terendah di Kalimantan Timur terlihat cenderung mengalami peningkatan, dari 1,23 tahun pada 2015 kemudian terus naik tiap tahunnya hingga mencapai 2,20 tahun pada tahun 2019. Sebaliknya, pada periode yang sama, selisih rata-rata lama sekolah kabupaten/kota tertinggi dan terendah di Kalimantan Timur terlihat cenderung mengalami penurunan dari 3,08 tahun pada tahun 2015 dan terus turun hingga menyentuh angka 3,02 pada tahun 2017, kemudian kembali naik tipis menjadi 3,03 tahun di 2018 hingga akhirnya kembali turun menjadi 2,84 di 2019.

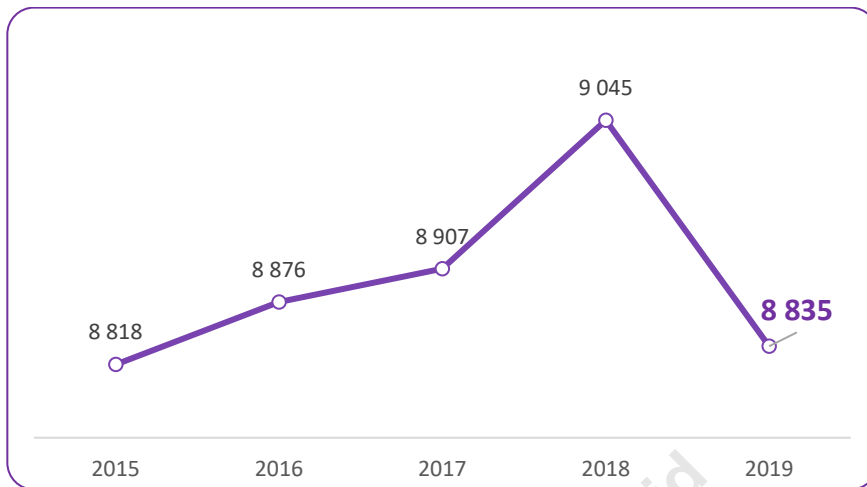




Sumber: Badan Pusat Statistik Kalimantan Timur

Gambar 4.4 Selisih Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota Tertinggi dan Terendah di Kalimantan Timur, 2015-2019 (tahun)

Dalam hal ini, pemerataan sarana dan akses pendidikan harus diperhatikan agar kesenjangan semakin kecil. Sampai tahun 2019, baru 4 kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur yang memiliki Universitas, yakni Kota Samarinda, Kota Balikpapan, Kota Bontang, dan Kabupaten Kutai Kartanegara. Adapun perguruan tinggi selain universitas juga terdapat di keempat wilayah tersebut beserta lima kabupaten lainnya, antara lain di Kabupaten Berau, Paser, PPU, Kutai Barat dan Kutai Timur. Sementara itu di Kabupaten Mahulu, belum terdapat perguruan tinggi meski satu sekalipun. Adapun untuk jenjang pendidikan SD-SMA, masing-masing telah terbangun secara cukup merata di setiap kabupaten/kota di Kalimantan Timur.

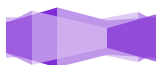


Sumber: Badan Pusat Statistik Kalimantan Timur

Gambar 4.5 Selisih Pengeluaran per Kapita Kabupaten/Kota Tertinggi dan Terendah di Kalimantan Timur, 2015-2019 (ribu rupiah)

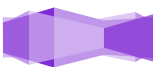
Dimensi terakhir dari pembangunan manusia adalah standar hidup layak yang diwakili oleh indikator pengeluaran per kapita per tahun yang disesuaikan. Indikator ini sangat erat kaitannya dengan kondisi perekonomian suatu wilayah. Selama kurun waktu 2015 hingga 2019, disparitas pengeluaran per kapita (d disesuaikan) antar kabupaten/kota di Kalimantan Timur cenderung meningkat. Pada tahun 2015, selisih pengeluaran per kapita kabupaten/kota tertinggi dan terendah sebesar 8,82 juta rupiah. Angka ini terus meningkat tiap tahunnya hingga menyentuh angka 9,05 juta rupiah pada tahun 2018. Pada 2019, angka ini turun menjadi 8,84 juta rupiah, namun ini masih sedikit lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun 2015 yang hanya sebesar 8,82 juta rupiah.

Setiap tahun, perekonomian cenderung membaik yang digambarkan oleh meningkatnya angka pengeluaran per kapita di Provinsi Kalimantan Timur dari tahun ke tahun (Gambar 3.7). Akan tetapi, sepertinya hal ini tidak diiringi dengan pemerataan perekonomian di tiap kabupaten/kotanya. Hal ini tergambar dari rentang pengeluaran per kapita di Kalimantan Timur yang cenderung melebar dari tahun ke tahun. Apabila hal ini terus diabaikan, maka jurang disparitas yang terbentuk akan semakin lebar pula.



Daftar Pustaka

- Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Timur. 2015. Kajian Indeks Pembangunan Gender Provinsi Kalimantan Timur. Samarinda: DKP3A Provinsi Kalimantan Timur.
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur. 2018. Rancangan Awal RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2023. Samarinda: Bappeda Provinsi Kalimantan Timur.
- Badan Pusat Statistik. 2019. Indeks Pembangunan Manusia 2018. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. 2020. Indeks Pembangunan Manusia 2019. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik Kalimantan Timur. 2019. Provinsi Kalimantan Timur Dalam Angka 2019. Samarinda: CV. Sekar Mulya.
- Badan Pusat Statistik Kalimantan Timur. 2020. Provinsi Kalimantan Timur Dalam Angka 2020. Samarinda: CV. Sekar Mulya.



L

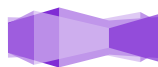
LAMPIRAN



Lampiran 1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi, 2019

No.	Provinsi	Umur Harapan Hidup (tahun)	Harapan Lama Sekolah (tahun)	Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	Pengeluaran per Kapita (ribu rupiah)	IPM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Aceh	69,87	14,30	9,18	9 603	71,90
2.	Sumatera Utara	68,95	13,15	9,45	10 649	71,74
3.	Sumatera Barat	69,31	14,01	8,92	10 925	72,39
4.	Riau	71,48	13,14	9,03	11 255	73,00
5.	Jambi	71,06	12,93	8,45	10 592	71,26
6.	Sumatera Selatan	69,65	12,39	8,18	10 937	70,02
7.	Bengkulu	69,21	13,59	8,73	10 409	71,21
8.	Lampung	70,51	12,63	7,92	10 114	69,57
9.	Kep. Bangka Belitung	70,50	11,94	7,98	12 959	71,30
10.	Kepulauan Riau	69,80	12,83	9,99	14 466	75,48
11.	Dki Jakarta	72,79	12,97	11,06	18 527	80,76
12.	Jawa Barat	72,85	12,48	8,37	11 152	72,03
13.	Jawa Tengah	74,23	12,67	7,53	11 102	71,72
14.	D I Yogyakarta	74,92	15,58	9,38	14 394	79,99
15.	Jawa Timur	71,18	13,16	7,59	11 739	71,50
16.	Banten	69,84	12,88	8,74	12 267	72,44
17.	Bali	71,99	13,27	8,84	14 146	75,38
18.	Nusa Tenggara Barat	66,28	13,48	7,27	10 640	68,14
19.	Nusa Tenggara Timur	66,85	13,15	7,55	7 769	65,23
20.	Kalimantan Barat	70,56	12,58	7,31	9 055	67,65
21.	Kalimantan Tengah	69,69	12,57	8,51	11 236	70,91
22.	Kalimantan Selatan	68,49	12,52	8,20	12 253	70,72
23.	Kalimantan Timur	74,22	13,69	9,70	12 359	76,61
24.	Kalimantan Utara	72,54	12,84	8,94	9 343	71,15
25.	Sulawesi Utara	71,58	12,73	9,43	11 115	72,99
26.	Sulawesi Tengah	68,23	13,14	8,75	9 604	69,50
27.	Sulawesi Selatan	70,43	13,36	8,26	11 118	71,66
28.	Sulawesi Tenggara	70,97	13,55	8,91	9 436	71,20
29.	Gorontalo	67,93	13,06	7,69	10 075	68,49
30.	Sulawesi Barat	64,82	12,62	7,73	9 235	65,73
31.	Maluku	65,82	13,94	9,81	8 887	69,45
32.	Maluku Utara	68,18	13,63	9,00	8 308	68,70
33.	Papua Barat	65,90	12,72	7,44	8 125	64,70
34.	Papua	65,65	11,05	6,65	7 336	60,84
	Indonesia	71,34	12,95	8,34	11 368	71,92

Sumber : BPS- Statistik Indonesia



Lampiran 2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi, 2015-2019

No.	Provinsi	IPM				
		2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Aceh	69,45	70,00	70,60	71,19	71,90
2.	Sumatera Utara	69,51	70,00	70,57	71,18	71,74
3.	Sumatera Barat	69,98	70,73	71,24	71,73	72,39
4.	Riau	70,84	71,20	71,79	72,44	73,00
5.	Jambi	68,89	69,62	69,99	70,65	71,26
6.	Sumatera Selatan	67,46	68,24	68,86	69,39	70,02
7.	Bengkulu	68,59	69,33	69,95	70,64	71,21
8.	Lampung	66,95	67,65	68,25	69,02	69,57
9.	Kep. Bangka Belitung	69,05	69,55	69,99	70,67	71,30
10.	Kepulauan Riau	73,75	73,99	74,45	74,84	75,48
11.	Dki Jakarta	78,99	79,60	80,06	80,47	80,76
12.	Jawa Barat	69,50	70,05	70,69	71,30	72,03
13.	Jawa Tengah	69,49	69,98	70,52	71,12	71,72
14.	D I Yogyakarta	77,59	78,38	78,89	79,53	79,99
15.	Jawa Timur	68,95	69,74	70,27	70,77	71,50
16.	Banten	70,27	70,96	71,42	71,95	72,44
17.	Bali	73,27	73,65	74,30	74,77	75,38
18.	Nusa Tenggara Barat	65,19	65,81	66,58	67,30	68,14
19.	Nusa Tenggara Timur	62,67	63,13	63,73	64,39	65,23
20.	Kalimantan Barat	65,59	65,88	66,26	66,98	67,65
21.	Kalimantan Tengah	68,53	69,13	69,79	70,42	70,91
22.	Kalimantan Selatan	68,38	69,05	69,65	70,17	70,72
23.	Kalimantan Timur	74,17	74,59	75,12	75,83	76,61
24.	Kalimantan Utara	68,76	69,20	69,84	70,56	71,15
25.	Sulawesi Utara	70,39	71,05	71,66	72,20	72,99
26.	Sulawesi Tengah	66,76	67,47	68,11	68,88	69,50
27.	Sulawesi Selatan	69,15	69,76	70,34	70,90	71,66
28.	Sulawesi Tenggara	68,75	69,31	69,86	70,61	71,20
29.	Gorontalo	65,86	66,29	67,01	67,71	68,49
30.	Sulawesi Barat	62,96	63,60	64,30	65,10	65,73
31.	Maluku	67,05	67,60	68,19	68,87	69,45
32.	Maluku Utara	65,91	66,63	67,20	67,76	68,70
33.	Papua Barat	61,73	62,21	62,99	63,74	64,70
34.	Papua	57,25	58,05	59,09	60,06	60,84
	Indonesia	69,55	70,18	70,81	71,39	71,92

**Lampiran 3. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Kalimantan Timur
menurut Kabupaten/Kota, 2015-2019**

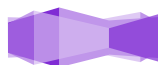
No.	Provinsi	IPM					Pertumbuhan IPM (2018-2019)
		2015	2016	2017	2018	2019	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Paser	70,30	71,00	71,16	71,61	72,29	0,95
2.	Kutai Barat	69,34	69,99	70,18	70,69	71,63	1,33
3.	Kutai Kartanegara	71,78	72,19	72,75	73,15	73,78	0,86
4.	Kutai Timur	70,76	71,10	71,91	72,56	73,49	1,28
5.	Berau	72,72	73,05	73,56	74,01	74,88	1,18
6.	Penajam Paser Utara	69,26	69,96	70,59	71,13	71,64	0,72
7.	Mahakam Ulu	64,89	65,51	66,09	66,67	67,58	1,36
8.	Balikpapan	78,18	78,57	79,01	79,81	80,11	0,38
9.	Samarinda	78,69	78,91	79,46	79,93	80,20	0,34
10.	Bontang	78,78	78,92	79,47	79,86	80,09	0,29
Kalimantan Timur		74,17	74,59	75,12	75,83	76,61	1,03

Sumber : BPS- Statistik Indonesia

**Lampiran 4. Umur Harapan Hidup (UHH) Provinsi Kalimantan Timur
Menurut Kabupaten/Kota (Tahun), 2015-2019**

No.	Provinsi	UHH				
		2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Paser	71,98	72,02	72,05	72,28	72,52
2.	Kutai Barat	72,19	72,28	72,37	72,57	72,79
3.	Kutai Kartanegara	71,60	71,64	71,68	71,93	72,21
4.	Kutai Timur	72,39	72,45	72,51	72,76	73,03
5.	Berau	71,31	71,37	71,44	71,68	71,94
6.	Penajam Paser Utara	70,53	70,80	70,82	71,05	71,30
7.	Mahakam Ulu	71,13	71,19	71,25	71,56	71,90
8.	Balikpapan	73,95	73,96	73,97	74,18	74,41
9.	Samarinda	73,65	73,68	73,71	73,93	74,17
10.	Bontang	73,69	73,71	73,72	73,94	74,18
Kalimantan Timur		73,65	73,68	73,70	73,96	74,22

Sumber : BPS- Statistik Indonesia



**Lampiran 5. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Provinsi Kalimantan Timur
Menurut Kabupaten/Kota (Tahun), 2015-2019**

No.	Provinsi	RLS				
		2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Paser	8,12	8,19	8,20	8,22	8,54
2.	Kutai Barat	8,02	8,03	8,06	8,07	8,34
3.	Kutai Kartanegara	8,68	8,71	8,83	8,84	9,10
4.	Kutai Timur	8,69	8,72	9,06	9,08	9,18
5.	Berau	8,62	8,78	8,96	8,98	9,25
6.	Penajam Paser Utara	7,59	7,60	7,95	8,03	8,16
7.	Mahakam Ulu	7,36	7,37	7,68	7,69	7,89
8.	Balikpapan	10,44	10,54	10,55	10,65	10,67
9.	Samarinda	10,31	10,33	10,34	10,46	10,47
10.	Bontang	10,38	10,39	10,70	10,72	10,73
	Kalimantan Timur	9,15	9,24	9,36	9,48	9,70

Sumber : BPS- Statistik Indonesia

**Lampiran 6. Harapan Lama Sekolah (HLS) Provinsi Kalimantan Timur Menurut
Kabupaten/Kota (Tahun), 2015-2019**

No.	Provinsi	HLS				
		2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Paser	12,65	12,96	12,98	12,99	13,00
2.	Kutai Barat	12,30	12,75	12,82	12,88	12,89
3.	Kutai Kartanegara	13,25	13,26	13,56	13,57	13,58
4.	Kutai Timur	12,43	12,44	12,48	12,65	12,78
5.	Berau	13,17	13,18	13,29	13,30	13,31
6.	Penajam Paser Utara	12,02	12,46	12,53	12,54	12,55
7.	Mahakam Ulu	12,03	12,42	12,47	12,48	12,50
8.	Balikpapan	13,46	13,59	13,75	14,12	14,13
9.	Samarinda	14,17	14,23	14,64	14,66	14,70
10.	Bontang	12,77	12,79	12,88	12,89	12,90
	Kalimantan Timur	13,18	13,35	13,49	13,67	13,69

Sumber : BPS- Statistik Indonesia

Lampiran 7. Pengeluaran per Kapita Provinsi Kalimantan Timur Menurut Kabupaten/Kota (Ribu Rupiah/Kapita/Tahun), 2015-2019

No.	Provinsi	HLS				
		2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Paser	9 900	10 171	10 280	10 605	10 767
2.	Kutai Barat	9 380	9 492	9 532	9 849	10 338
3.	Kutai Kartanegara	10 250	10 593	10 692	10 959	11 152
4.	Kutai Timur	9 704	9 960	10 273	10 614	11 196
5.	Berau	11 572	11 675	11 843	12 207	12 726
6.	Penajam Paser Utara	10 913	11 019	11 126	11 492	11 750
7.	Mahakam Ulu	7 162	7 281	7 364	7 653	8 008
8.	Balikpapan	13 705	13 883	14 254	14 557	14 791
9.	Samarinda	13 825	14 010	14 175	14 466	14 613
10.	Bontang	15 980	16 157	16 271	16 698	16 843
	Kalimantan Timur	11 229	11 355	11 612	11 917	12 359

Sumber : BPS- Statistik Indonesia

Lampiran 8. Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Umur Harapan Hidup (UHH), Rata-rata Lama Sekolah (RLS), Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Pengeluaran Per Kapita Per Tahun Provinsi Kalimantan Timur menurut Kabupaten/Kota, 2019

No.	Provinsi	Umur Harapan Hidup (tahun)	Harapan Lama Sekolah (tahun)	Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	Pengeluaran per Kapita (ribu rupiah)	IPM
1.	Paser	72,52	13,00	8,54	10 767	72,29
2.	Kutai Barat	72,79	12,89	8,34	10 338	71,63
3.	Kutai Kartanegara	72,21	13,58	9,10	11 152	73,78
4.	Kutai Timur	73,03	12,78	9,18	11 196	73,49
5.	Berau	71,94	13,31	9,25	12 726	74,88
6.	Penajam Paser Utara	71,30	12,55	8,16	11 750	71,64
7.	Mahakam Ulu	71,90	12,50	7,89	8 008	67,58
8.	Balikpapan	74,41	14,13	10,67	14 791	80,11
9.	Samarinda	74,17	14,70	10,47	14 613	80,20
10.	Bontang	74,18	12,90	10,73	16 843	80,09
	Kalimantan Timur	74,22	13,69	9,70	12 359	76,61

Sumber : BPS- Statistik Indonesia



Lampiran 9. Indeks Pembangunan Manusia, Umur Harapan Hidup, Rata-rata Lama Sekolah, Harapan Lama Sekolah, dan Pengeluaran Per Kapita Per Tahun Provinsi Kalimantan Timur, 2015-2019

No.	Komponen	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Indeks Pembangunan Manusia	74,17	74,59	75,12	75,83	76,61
2.	Umur Harapan Hidup (Tahun)	73,65	73,68	73,70	73,96	74,22
3.	Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	9,15	9,24	9,36	9,48	9,70
4.	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	13,18	13,35	13,49	13,67	13,69
5.	Pengeluaran Per Kapita Per tahun (Ribu Rupiah)	11 229	11 355	11 612	11 917	12 359

Sumber : BPS- Statistik Indonesia

Lampiran 10. Indeks Pembangunan Manusia, Umur Harapan Hidup, Rata-rata Lama Sekolah, Harapan Lama Sekolah, dan Pengeluaran Per Kapita Per Tahun Kabupaten Paser, 2015-2019

No.	Komponen	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Indeks Pembangunan Manusia	70,30	71,00	71,16	71,61	72,29
2.	Umur Harapan Hidup (Tahun)	71,98	72,02	72,05	72,28	72,52
3.	Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	8,12	8,19	8,20	8,22	8,54
4.	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	12,65	12,96	12,98	12,99	13,00
5.	Pengeluaran Per Kapita Per tahun (Ribu Rupiah)	9 900	10 171	10 280	10 605	10 767

Sumber : BPS- Statistik Indonesia

Lampiran 11. Indeks Pembangunan Manusia, Umur Harapan Hidup, Rata-rata Lama Sekolah, Harapan Lama Sekolah, dan Pengeluaran Per Kapita Per Tahun Kabupaten Kutai Barat, 2015-2019

No.	Komponen	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Indeks Pembangunan Manusia	69,34	69,99	70,18	70,69	71,63
2.	Umur Harapan Hidup (Tahun)	72,19	72,28	72,37	72,57	72,79
3.	Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	8,02	8,03	8,06	8,07	8,34
4.	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	12,30	12,75	12,82	12,88	12,89
5.	Pengeluaran Per Kapita Per tahun (Ribu Rupiah)	9 380	9 492	9 532	9 849	10 338

Sumber : BPS- Statistik Indonesia

Lampiran 12. Indeks Pembangunan Manusia, Umur Harapan Hidup, Rata-rata Lama Sekolah, Harapan Lama Sekolah, dan Pengeluaran Per Kapita Per Tahun Kabupaten Kutai Kartanegara, 2015-2019

No.	Komponen	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Indeks Pembangunan Manusia	71,78	72,19	72,75	73,15	73,78
2.	Umur Harapan Hidup (Tahun)	71,60	71,64	71,68	71,93	72,21
3.	Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	8,68	8,71	8,83	8,84	9,10
4.	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	13,25	13,26	13,56	13,57	13,58
5.	Pengeluaran Per Kapita Per tahun (Ribu Rupiah)	10 250	10 593	10 692	10 959	11 152

Sumber : BPS- Statistik Indonesia

Lampiran 13. Indeks Pembangunan Manusia, Umur Harapan Hidup, Rata-rata Lama Sekolah, Harapan Lama Sekolah, dan Pengeluaran Per Kapita Per Tahun Kabupaten Kutai Timur, 2015-2019

No.	Komponen	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Indeks Pembangunan Manusia	70,76	71,10	71,91	72,56	73,49
2.	Umur Harapan Hidup (Tahun)	72,39	72,45	72,51	72,76	73,03
3.	Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	8,69	8,72	9,06	9,08	9,18
4.	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	12,43	12,44	12,48	12,65	12,78
5.	Pengeluaran Per Kapita Per tahun (Ribu Rupiah)	9 704	9 960	10 273	10 614	11 196

Sumber : BPS- Statistik Indonesia

Lampiran 14. Indeks Pembangunan Manusia, Umur Harapan Hidup, Rata-rata Lama Sekolah,Harapan Lama Sekolah, dan Pengeluaran Per Kapita Per Tahun Kabupaten Berau, 2015-2019

No.	Komponen	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Indeks Pembangunan Manusia	72,72	73,05	73,56	74,01	74,88
2.	Umur Harapan Hidup (Tahun)	71,31	71,37	71,44	71,68	71,94
3.	Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	8,62	8,78	8,96	8,98	9,25
4.	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	13,17	13,18	13,29	13,30	13,31
5.	Pengeluaran Per Kapita Per tahun (Ribu Rupiah)	11 572	11 675	11 843	12 207	12 726

Sumber : BPS- Statistik Indonesia

Lampiran 15. Indeks Pembangunan Manusia, Umur Harapan Hidup, Rata-rata Lama Sekolah, Harapan Lama Sekolah, dan Pengeluaran Per Kapita Per Tahun Kabupaten Penajam Paser Utara, 2015-2019

No.	Komponen	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Indeks Pembangunan Manusia	69,26	69,96	70,59	71,13	71,64
2.	Umur Harapan Hidup (Tahun)	70,53	70,80	70,82	71,05	71,30
3.	Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	7,59	7,60	7,95	8,03	8,16
4.	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	12,02	12,46	12,53	12,54	12,55
5.	Pengeluaran Per Kapita Per tahun (Ribu Rupiah)	10 913	11 019	11 126	11 492	11 750

Sumber : BPS- Statistik Indonesia

Lampiran 16. Indeks Pembangunan Manusia, Umur Harapan Hidup, Rata-rata Lama Sekolah, Harapan Lama Sekolah, dan Pengeluaran Per Kapita Per Tahun Kabupaten Mahakam Ulu, 2015-2019

No.	Komponen	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Indeks Pembangunan Manusia	64,89	65,51	66,09	66,67	67,58
2.	Umur Harapan Hidup (Tahun)	71,13	71,19	71,25	71,56	71,90
3.	Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	7,36	7,37	7,68	7,69	7,89
4.	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	12,03	12,42	12,47	12,48	12,50
5.	Pengeluaran Per Kapita Per tahun (Ribu Rupiah)	7 162	7 281	7 364	7 653	8 008

Sumber : BPS- Statistik Indonesia

Lampiran 17. Indeks Pembangunan Manusia, Umur Harapan Hidup, Rata-rata Lama Sekolah, Harapan Lama Sekolah, dan Pengeluaran Per Kapita Per Tahun Kota Balikpapan, 2015-2019

No.	Komponen	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Indeks Pembangunan Manusia	78,18	78,57	79,01	79,81	80,11
2.	Umur Harapan Hidup (Tahun)	73,95	73,96	73,97	74,18	74,41
3.	Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	10,44	10,54	10,55	10,65	10,67
4.	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	13,46	13,59	13,75	14,12	14,13
5.	Pengeluaran Per Kapita Per tahun (Ribu Rupiah)	13 705	13 883	14 254	14 557	14 791

Sumber : BPS- Statistik Indonesia

Lampiran 18. Indeks Pembangunan Manusia, Umur Harapan Hidup, Rata-rata Lama Sekolah, Harapan Lama Sekolah, dan Pengeluaran Per Kapita Per Tahun Kota Samarinda, 2015-2019

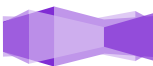
No.	Komponen	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Indeks Pembangunan Manusia	78,69	78,91	79,46	79,93	80,20
2.	Umur Harapan Hidup (Tahun)	73,65	73,68	73,71	73,93	74,17
3.	Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	10,31	10,33	10,34	10,46	10,47
4.	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	14,17	14,23	14,64	14,66	14,70
5.	Pengeluaran Per Kapita Per tahun (Ribu Rupiah)	13 825	14 010	14 175	14 466	14 613

Sumber : BPS- Statistik Indonesia

Lampiran 19. Indeks Pembangunan Manusia, Umur Harapan Hidup, Rata-rata Lama Sekolah, Harapan Lama Sekolah, dan Pengeluaran Per Kapita Per Tahun Kota Bontang, 2015-2019

No.	Komponen	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Indeks Pembangunan Manusia	78,78	78,92	79,47	79,86	80,09
2.	Umur Harapan Hidup (Tahun)	73,69	73,71	73,72	73,94	74,18
3.	Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	10,38	10,39	10,70	10,72	10,73
4.	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	12,77	12,79	12,88	12,89	12,90
5.	Pengeluaran Per Kapita Per tahun (Ribu Rupiah)	15 980	16 157	16 271	16 698	16 843

Sumber : BPS- Statistik Indonesia



CT

CATATAN TEKNIS



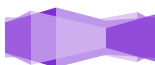
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Menurut UNDP, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli (*Purchasing Power Parity*). Kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak.

Umur Harapan Hidup

Umur Harapan Hidup (UHH) merupakan rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup. Penghitungan angka harapan hidup melalui pendekatan tak langsung (*indirect estimation*). Jenis data yang digunakan adalah Anak Lahir Hidup (ALH) dan Anak Masih Hidup (AMH). Paket program *Mortpack* digunakan untuk menghitung angka harapan hidup berdasarkan input data ALH dan AMH. Selanjutnya, dipilih metode *Trussell* dengan model *West*, yang sesuai dengan histori kependudukan dan kondisi Indonesia dan negara-negara Asia Tenggara umumnya.

Indeks harapan hidup dihitung dengan menghitung nilai maksimum dan nilai minimum harapan hidup sesuai standar UNDP, yaitu angka tertinggi sebagai batas atas untuk penghitungan indeks adalah 85 tahun dan terendah sebagai batas bawah adalah 20 tahun.



Tingkat Pendidikan

Salah satu komponen pembentuk IPM adalah dimensi pengetahuan yang diukur melalui tingkat pendidikan. Dalam hal ini, indikator yang digunakan adalah rata-rata lama sekolah (*mean years of schooling*) dan harapan lama sekolah (*expected years of schooling*). Pada proses pembentukan IPM, rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah diberi bobot yang sama, kemudian penggabungan kedua indikator ini digunakan sebagai indeks pendidikan yang menjadi salah satu komponen pembentuk IPM.

Rata-rata lama sekolah menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Penghitungan rata-rata lama sekolah menggunakan dua batasan yang dipakai sesuai kesepakatan UNDP. Rata-rata lama sekolah memiliki batas maksimumnya 15 tahun dan batas minimum sebesar 0 tahun.

Harapan lama sekolah didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Harapan lama sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. Indikator ini dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Seperti halnya rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah juga menggunakan batasan yang dipakai sesuai kesepakatan UNDP. Batas maksimum untuk harapan lama sekolah adalah 18 tahun, sedangkan batas minimumnya 0 (nol).

Standar Hidup Layak

Dimensi lain dari ukuran kualitas hidup manusia adalah standar hidup layak. Dalam cakupan lebih luas, standar hidup layak menggambarkan tingkat kesejahteraan yang dinikmati oleh penduduk sebagai dampak semakin membaiknya ekonomi. UNDP mengukur standar hidup layak menggunakan Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita yang disesuaikan, sedangkan BPS dalam menghitung standar hidup layak menggunakan rata-rata pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan dengan paritas daya beli (*purcasing power parity*) berbasis formula Rao.

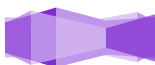
$$PPP_j = \prod_{i=1}^m \left(\frac{p_{ij}}{p_{ik}} \right)^{\frac{1}{m}}$$

Keterangan:

- PPP_j : paritas daya beli di wilayah j
 p_{ij} : harga komoditas i di kabupaten/kota j
 p_{ik} : harga komoditas i di Jakarta Selatan
 m : jumlah komoditas

Tabel L1. Komoditi Kebutuhan Pokok sebagai Dasar Penghitungan Daya Beli (PPP)

Beras	Pisang lainnya	Rokok kretek tanpa filter
Tepung terigu	Pepaya	Rokok putih
Ketela pohon/singkong	Minyak kelapa	Rumah sendiri/bebas sewa
Kentang	Minyak goreng lainnya	Rumah kontrak
Tongkol/tuna/cakalang	Kelapa	Rumah sewa
Kembung	Gula pasir	Rumah dinas
Bandeng	Teh	Listrik
Mujair	Kopi	Air PAM
Mas	Garam	LPG
Lele	Kecap	Minyak tanah
Ikan segar lainnya	Penyedap masakan/vetsin	Lainnya (batu baterai, aki, korek, obat nyamuk dll)
Daging sapi	Mie instan	Perlengkapan mandi
Daging ayam ras	Roti manis/roti lainnya	Barang kecantikan
Daging ayam kampung	Kue kering	Perawatan kulit, muka, kuku, rambut
Telur ayam ras	Kue basah	Sabun cuci
Susu kental manis	Makanan gorengan	Biaya RS Pemerintah
Susu bubuk	Gado-gado/ketoprak	Biaya RS Swasta
Susu bubuk bayi	Nasi campur/rames	Puskesmas/pustu
Bayam	Nasi goreng	Praktek dokter/poliklinik
Kangkung	Nasi putih	SPP
Kacang panjang	Lontong/ketupat sayur	Bensin
Bawang merah	Soto/gule/sop/rawon/cincang	Transportasi/pengangkutan umum



Bawang putih	Sate/tongseng	Pos dan Telekomunikasi
Cabe merah	Mie bakso/mie rebus/mie goreng	Pakaian jadi laki-laki dewasa
Cabe rawit	Makanan ringan anak	Pakaian jadi perempuan dewasa
Tahu	Ikang (goreng/bakar dll)	Pakaian jadi anak-anak
Tempe	Ayam/daging (goreng dll)	Alas kaki
Jeruk	Makanan jadi lainnya	Minyak Pelumas
Mangga	Air kemasan galon	Meubelair
Salak	Minuman jadi lainnya	Peralatan Rumah Tangga
Pisang ambon	Es lainnya	Perlengkapan perabot rumah tangga
Pisang raja	Roko kretek filter	Alat-alat Dapur/Makan

Penghitungan paritas daya beli dilakukan berdasarkan 96 komoditas kebutuhan pokok (Tabel L1). Batas maksimum dan minimum penghitungan pengeluaran per kapita yang digunakan dalam penghitungan IPM seperti terlihat dalam Tabel L2. Batas maksimum pengeluaran per kapita adalah sebesar Rp 26.572.352 sementara batas minimumnya adalah Rp 1.007.436.

Penyusunan Indeks

Sebelum menghitung IPM, setiap komponen IPM harus dihitung indeksinya. Formula yang digunakan dalam penghitungan indeks komponen IPM adalah sebagai berikut:

$$I_{UHH} = \frac{UHH - UHH_{min}}{UHH_{maks} - UHH_{min}}$$

$$I_{HLS} = \frac{HLS - HLS_{min}}{HLS_{maks} - HLS_{min}}$$

$$I_{RLS} = \frac{RLS - RLS_{min}}{RLS_{maks} - RLS_{min}}$$

$$I_{pendidikan} = \frac{I_{HLS} + I_{RLS}}{2}$$

$$I_{pengeluaran} = \frac{\ln(pengeluaran) - \ln(pengeluaran_{min})}{\ln(pengeluaran_{maks}) - \ln(pengeluaran_{min})}$$

Untuk menghitung indeks masing-masing komponen IPM digunakan batas maksimum dan minimum seperti terlihat dalam Tabel L2.

Tabel L2. Nilai Maksimum dan Minimum dari Setiap Komponen IPM

Komponen IPM	Satuan	Minimum	Maksimum
Umur Harapan Hidup (UHH)	Tahun	20	85
Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	0	18
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	0	15
Pengeluaran per Kapita	Rupiah	1.007.436*)	26.572.352**)

Keterangan:

* Daya beli minimum merupakan garis kemiskinan terendah kabupaten tahun 2010 (data empiris) yaitu di Tolikara-Papua

** Daya beli maksimum merupakan nilai tertinggi kabupaten yang diproyeksikan hingga 2025 (akhir RPJPN) yaitu perkiraan pengeluaran per kapita Jakarta Selatan tahun 2025

Selanjutnya nilai IPM dapat dihitung sebagai:

$$IPM = \sqrt[3]{I_{kesehatan} \times I_{pendidikan} \times I_{pengeluaran}}$$

Status Pembangunan Manusia

Capaian pembangunan manusia di suatu wilayah pada waktu tertentu dapat dikelompokkan ke dalam empat kelompok. Pengelompokan ini bertujuan untuk mengorganisasikan wilayah-wilayah menjadi kelompok-kelompok yang sama dalam hal pembangunan manusia.

1. Kelompok “sangat tinggi” : $IPM \geq 80$
2. Kelompok “tinggi” : $70 \leq IPM < 80$
3. Kelompok “sedang” : $60 \leq IPM < 70$
4. Kelompok “rendah” : $IPM < 60$



Pertumbuhan IPM

Untuk mengukur kecepatan perkembangan IPM dalam suatu kurun waktu digunakan ukuran pertumbuhan per tahun. Pertumbuhan IPM menunjukkan perbandingan antara perubahan capaian terkini dengan capaian tahun sebelumnya. Semakin tinggi nilai pertumbuhan IPM, maka semakin cepat pula peningkatan IPM. Indikator pertumbuhan IPM ini dapat digunakan sebagai kinerja pembangunan manusia suatu wilayah pada kurun waktu tertentu.

$$\text{Pertumbuhan IPM} = \frac{IPM_t - IPM_{t-1}}{IPM_{t-1}} \times 100 \%$$

Keterangan :

IPM_t : IPM suatu wilayah pada tahun t

$IPM_{(t-1)}$: IPM suatu wilayah pada tahun (t-1).

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**
Jl. Kemakmuran No. 04, Samarinda 75117
Telp.: 0541 732793 E-mail: bps6400@bps.go.id
Homepage: <https://kaltim.bps.go.id>

ISBN 978-623-7693-11-6

